Pendidikan Kewarganegaraan: Menjadi Warga Negara yang Baik
untuk Kelas VI SD/MI
Prayoga Bestari dan Ati Sumiati

Pendidikan Kewarganegaraan: Menjadi Warga Negara yang Baik

untuk Kelas VI
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

Prayoga Bestari
Ati Sumiati

6

PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

Pendidikan Kewarganegaraan:

Menjadi Warga Negara yang Baik

untuk Kelas VI
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

Prayoga Bestari
Ati Sumiati

Pendidikan Kewarganegaraan:

Menjadi Warga Negara yang Baik

untuk Kelas VI Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

Editor : Dindin Supratman
Vidia Tri Astuti
Layouter : Affandia Bimantara
Deden Moch. Sahid
Ilustrator : Syarip Permana
Desainer Sampul : M. Abdul Rifa'i

372.8
PRA
p

PRAYOGA Bestari
Pendidikan Kewarganegaraan 6 : Menjadi Warga Negara yang Baik untuk Kelas VI Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah / Penulis Prayoga Bestari, Ati Sumiati ; Editor Dindin Supratman, Vidia Tri Astuti ; Ilustrator Syarip Permana. -- Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009.
vi, 114 hlm. : ilus. ; 25 cm.
Bibliografi : hlm. 111
ISBN 978-979-068-082-1 (no.jil.lengkap)
ISBN 978-979-068-095-1

1. Pendidikan Moral Pancasila-Studi dan Pengajaran
2. Pendidikan Moral Pancasila-Pendidikan Dasar
I. Judul II. Ati Sumiati III. Dindin Supratman IV.Vidia Tri Astuti
VI. Syarip Permana

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional
Tahun 2009

Diperbanyak oleh .....

Kata Sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2008, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (website) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2008 tanggal 7 November 2008.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (down load), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Februari 2009
Kepala Pusat Perbukuan

Kata Pengantar

Selamat. Kamu sekarang telah duduk di kelas enam sekolah dasar. Mulai sekarang, kamu harus rajin belajar agar cita-citamu tercapai. Belajarlah sungguh-sungguh. Buku yang kamu baca ini adalah buku Pendidikan Kewarganegaraan. Buku ini menyampaikan pesan bagi kita untuk menjadi warga negara yang baik.

Buku ini dibuat untuk membantumu dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Warga negara yang baik harus mampu menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik.

Buku ini terdiri atas empat bab. Kamu akan mempelajarinya secara berurutan, dari yang mudah ke yang sukar. Ada empat bagian yang akan kamu pelajari dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan ini. Bagian itu adalah Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara, Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Peranan Indonesia di Asia Tenggara, Politik Luar Negeri Indonesia dalam Era Globalisasi. Buku ini dilengkapi dengan pelatihan-pelatihan yang dapat membantumu mengingat materi. Kamu dapat menguji kemampuanmu dalam memahami materi secara langsung. Namun, pelatihan sendiri atau bersama teman juga penting. Jika kamu sudah memahami Pendidikan Kewarganegaraan dengan baik, kamu mampu menerapkannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari.

Selamat mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan. Jangan malu atau segan untuk bertanya kepada gurumu jika ada materi yang kurang dipahami. Gunakan buku ini dan pahami isinya dengan baik. Jangan lupa berdoa sebelum belajar.

Penerbit

Memahami Bagian Buku Ini

Buku *Pendidikan Kewarganegaraan*: *Menjadi Warga Negara yang Baik* untuk kelas VI SD/MI ini terdiri atas empat bab, yaitu Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara, Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Peranan Indonesia di Asia Tenggara, serta Politik Luar Negeri Indonesia dalam Era Globalisasi. Agar pembelajaranmu lebih efektif, sebaiknya kamu pahami dahulu bagian-bagian dalam buku ini. Setiap bagian memiliki arah dan tujuan yang pada dasarnya mendukung isi materi buku. Mari, kita cermati bagian-bagian tersebut.
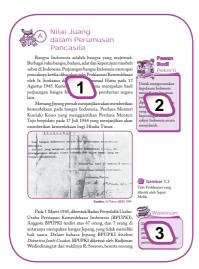
1. **Materi Pelajaran**

   Materi pelajaran menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

2. **Pesan Budi Pekerti**

   Pesan moral mengenai materi yang diajarkan.

3. **Wawasan**

   Wawasan mengenai materi tambahan yang berkaitan dengan materi yang diajarkan.

4. **Latihan**

   Latihan berisi kegiatan mandiri dan bersama.

5. **Evaluasi**

   Evaluasi berisi soal akhir bab, akhir semester dan akhir tahun yang berhubungan dengan materi pelajaran.

6. **Glosarium**

   Berisi pengertian istilah penting dalam materi.

Daftar Isi

Sumber: *www. courseware.com*

Sumber: *www.pnri.go.id*

Bab 1

Sumber: *www.courseware.com*

Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Manfaat yang Kamu Peroleh

Kamu dapat mengetahui perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Kata Penting

Pancasila, Dasar Negara, Nilai Perjuangan, dan Nilai Kebersamaan.

Selamat. Kamu telah berhasil naik ke Kelas VI. Pada waktu kamu Kelas V, kamu telah mempelajari materi tentang mematuhi keputusan bersama. Materi tersebut merupakan bentuk pengamalan dari nilai-nilai Pancasila yang sejarah perumusannya akan dibahas pada bab ini.

Tahukah kamu bahwa bangsa Indonesia memiliki Dasar Negara yang disebut Pancasila. Apakah yang disebut Pancasila? Bagaimana Pancasila itu lahir? Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Semua pertanyaan tersebut akan kamu temukan jawabannya dalam pembahasan bab ini. Sebelum kamu mempelajari bab ini, perhatikanlah peta konsep berikut.

A. Nilai Juang dalam Perumusan Pancasila

B. Nilai Kebersamaan dalam Perumusan Pancasila

C. Meneladani Nilai-Nilai Perjuangan

Peta Konsep

Perumusan Pancasila
meliputi
Nilai Juang dalam Perumusan Pancasila
antara lain
Nasionalisme
Kebersamaan
Pantang Menyerah
Keistimewaan Pancasila
yaitu
Pancasila Digali dari Nilai Luhur Bangsa Indonesia
Kedudukan Pancasila
yaitu
Pandangan Hidup
Dasar Negara
Sumber Hukum Tertinggi

A Nilai Juang dalam Perumusan Pancasila
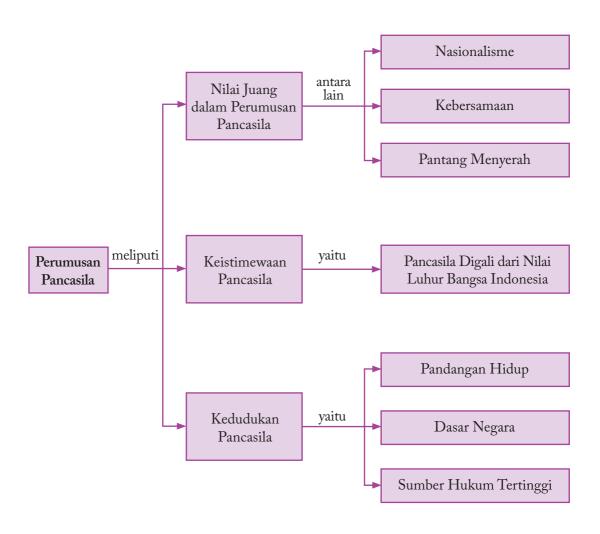
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Berbagai suku bangsa, budaya, adat dan kepercayaan tumbuh subur di Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia mencapai puncaknya ketika dibacakan teks Proklamasi Kemerdekaan oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta pada 17 Agustus 1945.

Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia, bukan pemberian negara lain. Memang Jepang pernah menjanjikan akan memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Perdana Menteri Kuniaki Koiso yang menggantikan Perdana Menteri Tojo berpidato pada 17 Juli 1944 yang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan bagi Hindia Timur. Para tokoh terdahulu bangsa Indonesia, semakin terpanggil untuk berjuang dan membuktikan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah sebuah hadiah dari bangsa penjajah.

Ayo, Berlatih

Diskusikan dengan temanmu. Bagaimana isi dari teks Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945 menurut pandangan kalian? Kemudian, laporkan hasilnya kepada gurumu.

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia.
Hal2 jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen

Atas nama bangsa Indonesia.

Soekarno/Hatta.

Sumber: *50 Tahun ABRI*, 1995

Gambar 1.1

Teks Proklamasi yang diketik oleh Sajuti Melik.

Pada 1 Maret 1945, dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Anggota BPUPKI terdiri atas 67 orang dan 7 orang di antaranya merupakan bangsa Jepang, yang tidak memiliki hak suara. Dalam bahasa Jepang BPUPKI disebut

Dokuritsu Junbi Cosakai. BPUPKI diketuai oleh Radjiman Wediodiningrat dan wakilnya R. Soeroso beserta seorang yang berkebangsaaan Jepang.

Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta akhirnya memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 pukul 10.00 pagi di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta (sekarang menjadi Gedung Perintis Kemerdekaan di Jalan Proklamasi). Hari itu bertepatan dengan bulan Ramadhan (bulan puasa pada kalender umat Islam).

Gambar 1.2

Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*, 1977

Pengibaran bendera Merah Putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati (istri Soekarno) dilakukan oleh Latief Hendraningrat dan Suhud. Adapun lagu ciptaan WR. Soepratman, *Indonesia Raya* dinyanyikan bersama-sama secara serentak.
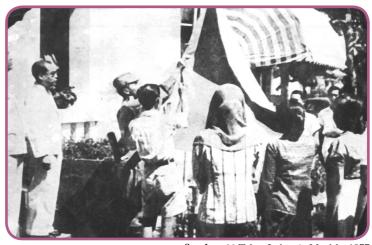
Gambar 1.3

Suasana pengibaran bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 1945.

Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*, 1977

Pancasila lahir tidak semudah yang dibayangkan. Kelahirannya memerlukan proses yang sangat lama. Dimulai dari perjuangan rakyat Indonesia yang bersatu dalam melawan penjajah sampai akhirnya tercetuslah istilah Pancasila yang menjadi dasar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Istilah Pancasila sebenarnya telah dikenal sejak zaman Majapahit yaitu sekitar abad ke-14 yang terdapat dalam kitab *Negarakertagama* dan *Sutasoma*. Kitab *Negarakertagama* merupakan karya dari Mpu Prapanca, sedangkan kitab *Sutasoma* merupakan karya Mpu Tantular.

Diskusikan dengan temanmu. Apakah ada perbedaan antara Pancasila yang termuat dalam kitab *Negarakertagama* dan *Sutasoma*? Kemudian, laporan hasilnya kepada gurumu.

1. Sidang BPUPKI Pertama

Sidang BPUPKI dilaksanakan selama empat hari, dimulai tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Berturut-turut yang tampil untuk berpidato menyampaikan usulan, di antaranya Mr. Mohammad Yamin, Soepomo, dan Ir. Soekarno. Ketiga tokoh tersebut sama-sama membicarakan tentang dasar negara.

Dalam perumusan dasar negara terdapat tiga tokoh yang masing-masing mengajukan lima dasar negara. Untuk lebih jelasnya mari bandingkan pendapat dari ketiga tokoh tersebut.

Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*, 1977

Gambar 1.4

Ir. Soekarno saat mengusulkan rumusan Pancasila dalam Sidang BPUPKI.

a. Mr. Mohammad Yamin

Saat sidang BPUPKI pada 29 Mei 1945 beliau menyampaikan lima dasar negara, yaitu:

1. peri kebangsaan;
2. peri kemanusiaan;
3. peri ketuhanan;
4. peri kerakyatan;
5. kesejahteraan rakyat.

Sumber: *www.presidenpnri.go.id*

Gambar 1.5

Soepomo ialah salah seorang yang mengusulkan lima dasar negara.

b. Prof. Dr. Soepomo

Pada 31 Mei 1945, Prof. Dr. Soepomo mengusulkan lima dasar negara sebagai berikut.

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Mufakat dan demokrasi
4. Musyawarah
5. Keadilan sosial

c. Ir. Soekarno

Pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengusulkan lima dasar negara Indonesia yang diberi nama Pancasila. Kelima rancangan tersebut, yaitu sebagai berikut.

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau perikemanusiaan
3. Mufakat dan demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Pada akhir sidang, tidak ada keputusan tentang rumusan dasar negara yang mana yang dapat diterima. Kemudian, BPUPKI membentuk Panitia Sembilan untuk membahas usulan-usulan tersebut. Akhirnya, pada 22 Juni 1945 Panitia Sembilan berhasil merumuskan Piagam Jakarta.

Rumusan Pancasila yang termuat dalam Piagam Jakarta yang ditandatangani oleh Panitia Sembilan dinyatakan juga sebagai rumusan BPUPKI. Rumusan Pancasila pada 22 Juni 1945 (Rumusan Piagam Jakarta) adalah sebagai berikut.

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Figur

Sumber : *www.googleimages.com*

K.H. Dewantara ialah salah seorang pahlawan nasional Indonesia yang menjadi bagian dari anggota BPUPKI.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Sidang BPUPKI Kedua

Hari pertama sebelum sidang BPUPKI kedua dimulai, diumumkan oleh ketua bahwa ada penambahan enam anggota baru Badan Penyelidik yaitu: Abdul Fatah Hasan, Asikin Natanegara, Soerjo Hamidjojo, Muhammad Noor, Mas Besar, dan Abdul Kaffar.

Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka,* 1977

Gambar 1.6
Sidang BPUPKI II pada 10-16 Juli 1945.

Ir. Soekarno sebagai Ketua Panitia Kecil melaporkan hasil pertemuannya yang dilakukan sejak 1 Juni yang lalu. Menurut laporan itu, pada 22 Juni 1945 Ir. Soekarno mengadakan pertemuan antara Panitia Kecil dengan anggota-anggota Badan Penyelidik. Tokoh yang hadir dalam pertemuan itu berjumlah 38 anggota, yaitu anggota-anggota Badan Penyelidik yang merangkap menjadi anggota *Cuo Sangi In* dari luar Jakarta, dan pada waktu itu Jakarta menjadi tempat rapat *Cuo Sangi In*. Dari sidang ini dibentuk Panitia Kecil yang beranggotakan 9 orang sehingga dikenal dengan nama Panitia Sembilan. Panitia ini diketuai oleh Ir Soekarno. Kesembilan orang tersebut, yaitu:

Untuk mempersatukan Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh, maka diperlukan adanya satu kesepakatan bersama yang mampu mewakili kepentingan semua rakyat Indonesia secara menyeluruh.

a. Ir. Soekarno,
b. Drs. Mohammad Hatta,
c. Mohamad Yamin,
d. Ahmad Subarjo,
e. A.A. Maramis,
f. H. Agus Salim,
g. Abikusno Tjokrosujoso,
h. K.H. Abdul Kahar Muzakir, dan
i. K.H. Wachid Hasim.

Meskipun terjadi pertemuan yang alot, akhirnya Panitia Sembilan mencapai suatu persetujuan antara golongan Islam dan golongan kebangsaan. Kesepakatan itu tertuang dalam suatu rancangan Pembukaan hukum dasar yang disebut Pembukaan yang disahkan pada 10 Juli 1945. Panitia kecil badan penyelidik menyetujui sebulat-bulatnya rancangan pembukaan yang disusun oleh Panitia Sembilan tersebut. Jadi, keinginan sebagian besar anggota Badan Penyelidik adalah menghendaki Indonesia Raya yang sesungguhnya mempersatukan semua Kepulauan Indonesia.

Peta 1.1
Wilayah Indonesia yang begitu luas sangat memerlukan sebuah aturan yang mampu mempersatukannya.

Sumber: *Peta Indonesia dan Dunia*, 2005

3. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

Jepang membubarkan BPUPKI pada 7 Agustus 1945 sebelum terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian, untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara setelah terjadinya proklamasi kemerdekaan, maka dibentuklah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (*Dokuritsu Junbi Linkai*) sebagai penggantinya.

Pada 18 Agustus 1945, tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Sebelum sidang resmi dimulai, kira-kira 20 menit dilakukan pertemuan untuk membahas beberapa perubahan yang berkaitan dengan rancangan panitia pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada saat itu dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Sidang pertama PPKI dihadiri 27 orang dan menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut.

a. Menetapkan dan mengesahkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahan-bahannya diambil dari Rancangan Pembukaan UUD 1945 yang telah disusun oleh panitia perumus pada 22 Juni 1945 dengan berbagai perubahan.
b. Menetapkan dan mengesahkan UUD yang bahan-bahannya hampir seluruhnya diambil dari rancangan UUD yang disusun oleh panitia perancang UUD pada 16 Juli 1945.
c. Memilih Ketua PPKI Ir. Soekarno dan wakil ketua Drs. Mohammad Hatta masing-masing menjadi Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia.

Mengenal Bahasa Inggris

Adil	=	*Fair*
Bangsa	=	*Nation*
Hukum	=	*Law*
Negara	=	*State*
Sumber	=	*Source*

Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*, 1977

Gambar 1.7
Selain sebagai tokoh proklamator, Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta dikenal juga sebagai ketua dan wakil ketua PPKI.

d. Pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Dalam sidang pertamanya 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan undang-undang dasar negara Indonesia yang kini terkenal dengan sebutan UUD 1945, terdiri atas dua bagian, yaitu "Pembukaan" yang di dalamnya memuat Pancasila dan "Batang Tubuh UUD."

Pesan Budi Pekerti

Setiap warga negara yang mampu secara jasmani dan rohani, harus mau berjuang demi bangsa dan negara dengan diliputi oleh semangat pantang menyerah dan rasa kebersamaan yang tinggi, seperti halnya perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia terdahulu.

Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 1968 ditegaskan kembali tentang rumusan Pancasila sebagai berikut.

a. Ketuhanan Yang Maha Esa.
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
c. Persatuan Indonesia.
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila yang dikembangkan oleh para tokoh kemerdekaan RI, antara lain sebagai berikut.

a. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. Memiliki sikap untuk berani dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran
c. Pendirian setiap bangsa di dunia memiliki harkat dan martabat yang sama
d. Sikap rela berkorban, harta, jiwa, tenaga, dan pikiran demi kepentingan bersama

Gambar 1.8

Sebagai wujud patriotisme, TNI selalu berjuang demi menjaga kedaulatan negara.

Sumber: *www.hinamagazine.com*

e. Sikap bersedia musyawarah dan mufakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
f. Sikap sederhana dalam hidup, hemat, bekerja keras, dan pantang menyerah
g. Sikap persatuan dan kesatuan bangsa meskipun didalamnya terdapat perbedaan asal-usul, suku, ras, agama dan sebagainya
h. Sikap mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan dan pribadi.

Latihan Mandiri

Kerjakan pada buku tugasmu.
Tulislah nilai-nilai perjuangan para perumus Pancasila yang dapat diterapkan dalam kehidupan. Laporkan hasilnya kepada gurumu.

No.	Nilai-Nilai Perjuangan
1.	______________________
2.	______________________
3.	______________________
4.	______________________
5.	______________________

B Nilai Kebersamaan dalam Perumusan Pancasila

Adanya kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila menunjukkan bahwa para tokoh pejuang sangat mempertimbangkan masa depan bangsa dan negaranya. Mereka banyak mengorbankan pikiran, waktu, dan tenaga demi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sumber: *50 Tahun ABRI*, 1995

Gambar 1.9
Dengan semangat yang pantang penyerah, bangsa Indonesia mengorbankan seluruh jiwa dan raga demi meraih kemerdekaan.

Para pejuang tersebut memiliki jiwa dan semangat kejuangan yang tinggi untuk merdeka. Jiwa dan semangat kejuangan yang dimiliki oleh pejuang itu, di antaranya sebagai berikut.

1. Jiwa solidaritas atau kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan.
2. *Pro patria* dan *primus patrialis*, yaitu selalu berjiwa untuk tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air.
3. Jiwa toleransi atau tenggang rasa antarumat beragama, suku, golongan, dan bangsa.
4. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab.
5. Jiwa ksatria, kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam.

Semangat dan nilai juang para pejuang bangsa dalam merebut kemerdekaan sudah tidak dapat diragukan. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya kemauan yang besar

Ayo, Berlatih

Diskusikan dengan temanmu. Bagaimana cara menumbuhkan rasa kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian, laporkan hasilnya pada gurumu.

untuk mengorbankan kepentingan pribadi demi tetap tegaknya bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para tokoh pendahulu kita berani melepaskan ambisi pribadi hanya demi sebuah kata kebersamaan.

Pancasila diambil dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang telah mengakar sejak zaman dahulu. Untuk itu, merupakan sebuah kewajiban bagi bangsa Indonesia untuk selalu menghormati nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yaitu Pancasila agar dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

Pesan Budi Pekerti

Nilai-nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila harus dapat dijadikan sebagai teladan bagi generasi muda pada masa sekarang untuk menumbuhkan dan meningkatkan semangat kebersamaan serta melanjutkan perjuangan dalam rangka mengisi kemerdekaan.

Sumber: *www.wordpress.com*

Gambar 1.10

Pancasila sebagai dasar negara mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Pancasila adalah dasar negara Indonesia, hal ini sesuai dengan pembukaan UUD 1945 sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila tidak hanya sebagai jiwa bangsa Indonesia, juga sebagai Kepribadian bangsa Indonesia. Salah satu upaya nyata seorang pelajar dalam menghormati semangat dan nilai-nilai kebersamaan dalam perumusan Pancasila adalah sebagai berikut :

1. belajar dengan rajin,
2. tidak memaksakan kehendak kepada orang lain,
3. saling menghormati perbedaan,
4. tidak semena-mena terhadap orang lain.

Latihan Bersama

Kerjakan pada buku tugasmu.
Buatlah kelompok yang terdiri atas tiga orang laki-laki dan tiga orang perempuan. Tuliskan contoh nilai-nilai Pancasila yang dapat diterapkan di lingkungan keluargamu. Kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.

No.	Nilai-Nilai Perjuangan
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

C Meneladani Nilai-Nilai Perjuangan

Nilai-nilai luhur para pahlawan tentunya penting untuk diteladani dan dilakukan oleh kita sebagai bangsa Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus memupuk dan mengembangkan nilai-nilai juang yang telah dicontohkan oleh para pejuang. Nilai juang bangsa Indonesia dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu nilai dasar dan nilai operasional.

1. Nilai Dasar

Nilai dasar adalah asas-asas yang diterima sebagai nilai kebenaran yang ada dan perlu dilestarikan. Nilai-nilai dasar ini merupakan perwujudan tatanan nilai budaya luhur yang dijadikan pedoman hidup dan kekuatan moral spiritual bangsa Indonesia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Adapun nilai-nilai dasar tersebut adalah sebagai berikut.

a. Nilai-nilai dalam Pancasila, yaitu kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong.
b. Nilai-nilai Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, yaitu nasionalisme dan patriotisme.
c. Nilai-nilai dalam UUD 1945, yaitu semangat kebangsaan dan kemerdekaan.

Figur

Sumber : *www.wordpress.com*

Dr. Soetomo ialah tokoh pendiri Budi Utomo, organisasi pergerakan yang pertama di Indonesia.

2. Nilai Operasional

Nilai operasional atau *praksis* adalah pelaksanaan dari nilai dasar, biasanya berbentuk norma hukum atau norma sosial.

Hal-hal yang termasuk dalam nilai-nilai operasional itu adalah sebagai berikut.

a. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. Jiwa dan semangat merdeka dan antipenjajahan
c. Patriotisme
d. Kepahlawanan
e. Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka
f. Pantang mundur dan tidak kenal menyerah

g. Persatuan dan kesatuan
h. bekerja tidak mengharapkan balasan
i. Percaya kepada diri sendiri atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri
j. Pembangunan nasional
k. Percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya
l. Idealisme kejuangan yang tinggi
m. Berani, rela, dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa dan negara
n. Nasionalisme

Gambar 1.11

Upacara bendera yang dilakukan dengan khidmat merupakan salah satu cara dalam menumbuhkan semangat nasionalisme.

Sumber: *www.indonesia.com*

o. Kesetiakawanan dan senasib sepenanggungan dalam kebersamaan
p. Disiplin yang tinggi
q. Ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan

Wawasan

Dalam melakukan perjuangannya, para perumus Pancasila dilandasi oleh semangat pantang menyerah dan nilai-nilai kejuangan yang tidak pernah mati dalam dirinya hanya untuk Indonesia tercinta.

Sebagai warga negara yang baik seseorang perlu untuk mempraktikkan nilai-nilai operasional tersebut dalam kehidupan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun dalam masyarakat.

Tidak hanya memiliki jiwa yang tangguh, para pejuang pun memiliki semangat yang menggebu-gebu dan patut diteladani oleh semua orang sebagai generasi penerus bangsa ini, di antaranya dengan menumbuhkan:

a. semangat menentang dominasi asing, terutama penjajahan;

b. semangat dalam pengorbanan jiwa, raga maupun harta benda;
c. semangat tahan menderita dan tahan uji;
d. semangat kepahlawanan;
e. semangat persatuan dan kesatuan;
f. percaya pada diri sendiri.

Sebagai siswa yang baik, tentunya dapat meneladani nilai-nilai luhur para pahlawan tersebut. Caranya, dapat diwujudkan dalam perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Di antara sikap dan perilaku yang dapat dikembangkan tersebut misalnya:

Pesan Budi Pekerti

Untuk meneladani nilai-nilai perjuangan, generasi muda harus memiliki kepedulian terhadap hasil perjuangan para pahlawan bangsa dalam meraih kemerdekaan.

1. Di Lingkungan Keluarga

Sikap keteladanan dan nilai-nilai luhur pahlawan di lingkungan keluarga dapat diterapkan melalui hal-hal berikut:

a. mencintai dan menyayangi orangtua;

Sumber: *d'Maestro*, Mei 2005

Gambar 1.12
Menciptakan suasan ceria dengan keluarga termasuk bentuk nyata kecintaan terhadap orangtua..

b. menaati segala nasihatnya;
c. mengerjakan pekerjaan rumah atau tugas-tugas dengan serius, ulet, dan rajin;
d. disiplin terhadap waktu;
e. berbuat sopan terhadap ayah, ibu, saudara dan anggota keluarga lainnya di rumah;
f. menjaga hubungan baik dengan tetangga;
g. rajin belajar dan pantang menyerah untuk meraih prestasi yang diinginkan.

Ayo, Berlatih

Diskusikan dengan temanmu. Bagaimana cara generasi muda mengembangkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai perjuangan di lingkungan sekolah? Kemudian, laporkan hasilnya kepada gurumu.

2. Di Lingkungan Sekolah

Berikut ini beberapa contoh sikap yang dapat dikembangkan di lingkungan sekolah untuk meneladani nilai-nilai luhur perjuangan para pahlawan bangsa, yaitu:

a. menolong sesama teman yang membutuhkan tanpa membedakan;
b. mencintai dan menyayangi sesama teman;
c. menyayangi dan menghormati guru;
d. penuh konsentrasi ketika mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh bapak atau ibu guru;
e. mengerjakan tugas-tugas sekolah;
f. tidak terbiasa untuk kesiangan;
g. tekun dan giat belajar;

Gambar 1.13

Melalui belajar yang tekun maka prestasi yang tinggi dapat mudah diraih.

Sumber: *www.pikiran rakyat.com*

h. penuh semangat tanpa putus asa dalam meraih prestasi;
i. patuh dan taat terhadap peraturan sekolah.

Sekolah dapat menjadi tempat yang ideal untuk menuntut ilmu jika siswa, guru, dan kepala sekolah saling memberikan dukungan terhadap terciptanya lingkungan belajar yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, beberapa contoh sikap di atas harus dilakukan tanpa pamrih, dengan begitu dapat memberikan hasil yang benar-benar mencerminkan wujud dari sikap meneladani nilai-nilai perjuangan.

3. Lingkungan Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai keteladanan para pahlawan dapat diterapkan melalui cara-cara, yaitu:

a. berperilaku sopan dan santun dengan penuh tata krama di masyarakat;
b. meningkatkan kedisiplinan dalam mengisi kemerdekaan;
c. berperan serta dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) RI serta dapat mengambil maknanya;
d. mencintai lagu-lagu daerah dan seni kebudayaan Indonesia;
e. menghormati orang lain dengan penuh rasa tanggung jawab;
f. menunjukkan rasa kecintaan yang tinggi terhadap masyarakat, bangsa, dan negara;
g. meningkatkan kesadaran untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Ayo, Berlatih

Diskusikan dengan temanmu. Bagaimana cara generasi muda mengembangkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai perjuangan di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara? Kemudian, laporkan hasilnya kepada gurumu.

Sumber: *www.bukittinggi.go.id*

Gambar 1.14
Membantu korban bencana alam merupakan wujud nyata dalam meneladani nilai-nilai perjuangan.

Tentunya perilaku itu harus dibuktikan dengan akhlak dan budi pekerti yang terpuji. Perilaku tersebut harus dibiasakan untuk dipraktikkan dalam kehidupan, baik di keluarga, sekolah maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Latihan Bersama

Kerjakan pada buku tugasmu.

Buatlah kelompok yang terdiri atas lima orang. Usahakan berbeda jenis kelamin, kemudian diskusikan bersama anggota kelompokmu bagaimana cara terbaik dalam menyelesaikan salah satu masalah berikut ini. Temukan jalan keluarnya dengan cara bermusyawarah sehingga dapat diperoleh jalan keluar terbaik yang mewakili pendapat dari setiap anggota kelompok. Dengan aktivitas ini diharapkan siswa mampu meningkatkan nilai-nilai kebersamaan. Berikut ini sejumlah masalah yang perlu dipecahkan:

No.	Masalah	Cara Mengatasi Masalah
1.	Herman menyontek ketika mengerjakan soal ujian.	_________________
2.	Jeni hanya berteman dengan siswa atau siswi yang kaya raya.	_________________
3.	Beni sebagai juara kelas mencari ilmu hanya untuk dirinya sendiri.	_________________

Ringkasan Bab 1

- Perjuangan bangsa Indonesia mencapai puncaknya ketika dibacakan teks Proklamasi kemerdekaan oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta pada 17 Agustus 1945.
- Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta akhirnya memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 pukul 10.00 pagi di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56, Jakarta.
- Kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila menunjukkan bahwa para tokoh pejuang sangat mempertimbangkan masa depan bangsa dan negaranya.
- Istilah Pancasila terdapat dalam kitab *Negarakertagama* karya Mpu Prapanca dan kitab *Sutasoma* karya Mpu Tantular.
- Rumusan Pancasila yang disepakati antara lain:
  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kemanusia yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Mengukur Kemampuan

Berikan tanda (✓) pada kolom Ya atau Tidak pada beberapa pernyataan berikut. Kemudian, berikan komentarmu.

No.	Pernyataan	Ya	Tidak	Komentar
1.	Rumusan Pancasila sudah sepenuhnya sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.			
2.	Nilai-nilai kebersamaan bukan satu-satunya hal yang utama dalam merumuskan Pancasila.			
3.	Meneladani nilai-nilai perjuangan hanya tanggung jawab generasi muda saja.			

Evaluasi Bab 1

Kerjakan pada buku tugasmu.

A. Pilihlah jawaban yang tepat.

1. Rumusan Pancasila yang benar dan menjadi pedoman berbangsa dan bernegara terdapat pada ....
   a. Pembukaan UUD NKRI 1945
   b. Batang Tubuh UUD NKRI 1945
   c. Seluruh pasal dalam UUD NKRI 1945
   d. Tap MPR No. IV/MPR/2000
2. Nilai luhur perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah ....
   a. mengutamakan kelompok
   b. menumbuhkan semangat kebersamaan
   c. berjuang dengan mengharapkan imbalan
   d. membantu orang lain karena terpaksa
3. Sikap saling menghormati antarsuku bangsa merupakan kewajiban pergaulan terhadap sesama manusia, terutama karena kita ....
   a. menerima sifat perbedaan
   b. senasib sepenanggungan
   c. sama-sama warga negara
   d. diwajibkan bersikap demikian
4. Naskah Proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia diketik oleh ....
   a. Wikana
   b. Sajuti Melik
   c. Adam Malik
   d. Chairul Saleh
5. *Dokuritsu Junbi Cosakai* merupakan nama lain dari ....
   a. PPKI
   b. BPUPKI
   c. KNIP
   d. Dewan Revolusi Rakyat
6. Pembacaan naskah Proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di jalan ....
   a. Imam Bonjol No. 1
   b. Cikini Raya No. 15
   c. Pegangsaan Timur No. 56
   d. Kwitang Raya No. 16
7. Selalu berjiwa untuk tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air dikenal dengan istilah ....
   a. *Pro patrialis*
   b. *Pro patri* dan *primus patrialis*
   c. *Primus patri*
   d. *Pro sosialis*
8. Nilai-nilai keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah ....
   a. penuh semangat tanpa putus asa dalam meraih prestasi
   b. penuh konsentrasi ketika mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh bapak atau ibu guru
   c. patuh dan taat pada aturan sekolah
   d. berperilaku sopan dan santun dengan penuh tata krama di masyarakat
9. Berikut adalah contoh yang termasuk ke dalam nilai operasional, yaitu....
   a. disiplin terhadap waktu
   b. menjaga hubungan baik dengan tetangga
   c. rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka
   d. menaati segala nasihatnya
10. Presiden dan wakil presiden pertama dibentuk dengan cara ....

a. dipilih langsung oleh rakyat
b. mengangkat dirinya sendiri
c. direkomendasikan MPR
d. aklamasi suara bulat di PPKI

11. Hasil kerja dari Panitia Sembilan adalah ....
    a. UUD NKRI 1945
    b. GBHN
    c. Piagam Jakarta
    d. KNIP

12. Orang yang menjanjikan kemerdekaan bagi Hindia Timur ....
    a. Perdana Menteri Kuniaki Koiso
    b. Perdana Menteri Tojo
    c. Jenderal Terauci
    d. Kapten Yamamoto

13. Orang yang menyampaikan rumusan lima dasar negara dalam sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945 ialah ....
    a. Mr. Mohammad Yamin
    b. Prof. Dr. Supomo
    c. Ir. Soekarno
    d. Drs. Moh. Hatta

14. Berikut adalah contoh nilai yang dikembangkan di lingkungan sekolah, yaitu ....
    a. meningkatkan kedisplinan dalam mengisi kemerdekaan
    b. menunjukkan rasa kecintaan yang tinggi terhadap masyarakat, bangsa, dan negara
    c. meningkatkan kesadaran untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
    d. menolong sesama teman yang membutuhkan tanpa membedakan

15. Pencipta lagu kebangsaan *Indonesia Raya*, yaitu ....
    a. Sajuti Melik
    b. W.R Supratman
    c. Soepomo
    d. MR. Mohamad Yamin

16. Pada 17 Agustus 1945 naskah Proklamasi Kemerdekaan RI ditandatangani atas nama bangsa Indonesia oleh ....
    a. Soekarno dan Soepomo
    b. Soekarno dan Soekarni
    c. Soekarno dan Mohammad Hatta
    d. Achmad Soebardjo dan Mohammad Hatta

17. Berikut orang yang merupakan golongan non-Islam dari sembilan tokoh BPUPKI, yaitu ....
    a. Mohammad Yamin
    b. AA. Maramis
    c. Ahmad Subarjo
    d. Abikusno Tjokrosujoso

18. Jumlah anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang dibentuk pada 7 Agustus 1945 sebanyak ....
    a. 9 orang
    b. 21 orang
    c. 27 orang
    d. 30 orang

19. Berikut ini adalah nama-nama tokoh yang mengajukan lima dasar negara, kecuali ....
    a. Prof. Dr. Supomo
    b. Drs. Mohammad Hatta
    c. Mr. Mohammad Yamin
    d. Ir. Soekarno

20. Berikut hal-hal yang dapat kamu lakukan untuk mengisi kemerdekaan RI, yaitu ....
    a. mengisinya dengan perilaku hura-hura
    b. berbuat sesuai zaman
    c. senang bermalas-malasan
    d. membuat prestasi yang baik untuk mengharumkan nama bangsa.

B. Isilah titik-titik berikut dengan benar.

1. Pada 6 dan 9 Agustus dua kota di Jepang, yaitu ... dan ... dibom oleh Sekutu.
2. Sang Saka Merah Putih dijahit oleh ... yang merupakan isteri dari Ir. Soekarno.
3. Kitab *Sutasoma* merupakan karya dari ....
4. *Dokuritsu Junbi Cosakai* disebut juga sebagai ....
5. *Dokuritsu Junbi Linkai* disebut juga sebagai ....
6. BPUPKI diketuai oleh ... dan ... dengan wakilnya seorang bangsa Jepang.
7. KNIP merupakan kepanjangan dari ....
8. Piagam Jakarta disebut juga dengan ....
9. Salah satu isi Piagam Jakarta adalah ....
10. BPUPKI mengadakan sidang 2 (dua) kali, yaitu pada ... dan ....

C. Jawablah pertanyaan berikut.

1. Bagaimana proses perjuangan Indonesia dalam meraih kemerdekaan?
2. Mengapa Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta menjadi tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia?
3. Apa yang dihasilkan dari sidang pertama PPKI?
4. Mengapa Indonesia perlu memiliki dasar negara?
5. Dari manakah dasar negara Indonesia berasal?
6. Apakah orang perlu bermusyawarah? Kemukakan alasanmu.
7. Sikap dan perilaku apa yang sebaiknya dikembangkan di lingkungan sekolah?
8. Mengapa kita perlu meneladani nilai-nilai perjuangan dan kebersamaan?
9. Apakah yang harus kita lakukan untuk menghargai perjuangan para pahlawan bangsa?
10. Menurutmu apakah perlu mengetahui proses perjuangan para pahlawan dalam meraih kemerdekaan?

Ayo, Kerjakan

Kunjungi salah satu museum sejarah. Temukan beberapa benda bersejarah yang berkaitan dengan peristiwa Proklamasi Kemerdekaan RI. Deskripsikan benda yang kalian temukan dan jelaskan hubungannya dengan peristiwa bersejarah tersebut. Laporkan hasilnya dalam buku tugas kelompok.

Bab

2

Sumber: *www.presidenri.go.id*

Sistem Pemerintahan Republik Indonesia

Manfaat yang Kamu Peroleh

Kamu dapat memahami sistem pemerintahan yang ada di Indonesia.

Kata Penting

Sistem Pemerintahan, Republik, Lembaga Negara, Pemilu, dan Pilkada.

Masih ingatkah kamu dengan materi Bab 1 tentang perumusan Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya? Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia banyak memengaruhi bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh Indonesia. Bahkan demokrasinya pun dikenal dengan Demokrasi Pancasila. Bentuk-bentuk pelaksanaan demokrasi tersebut di antaranya dengan diselenggarakannya Pemilu dan Pilkada di berbagai daerah. Tahukah kamu bagaimana sebenarnya sistem pemerintahan yang ada di Indonesia? Sebelum kamu mempelajari materi bab ini lebih mendalam, perhatikanlah Peta Konsep berikut.

A. Proses Pemilu dan Pilkada

B. Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia

C. Tugas dan Fungsi Pemerintahan

Peta Konsep
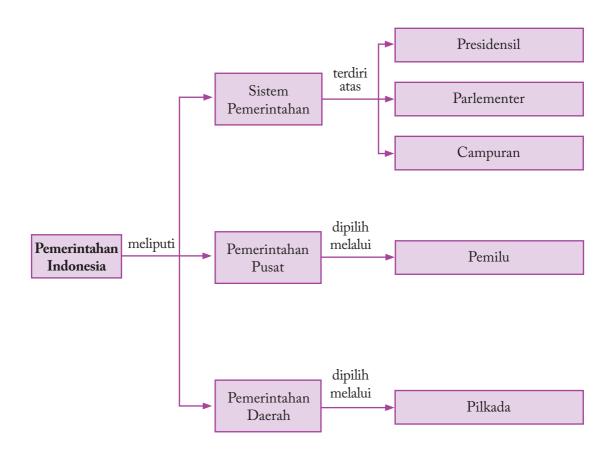
Pemerintahan Indonesia
meliputi
Sistem Pemerintahan
terdiri atas
Presidensil
Parlementer
Campuran
Pemerintahan Pusat
dipilih melalui
Pemilu
Pemerintahan Daerah
dipilih melalui
Pilkada

A Proses Pemilu dan Pilkada

Rakyat adalah pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyat yang menentukan bagaimana corak serta sistem pemerintahan diselenggarakan. Rakyat pula yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu. Namun, untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang baik diperlukan cara yang tepat untuk memperolehnya. Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, salah satu upaya untuk mencari bentuk pemerintahan yang baik adalah melalui proses Pemilihan Umum (Pemilu).

Demokrasi berasal dari kata *demos* yang artinya rakyat dan *kratos* yang artinya pemerintahan. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Hal ini berarti rakyat ikut terlibat dalam pemerintahan, negara. Misalnya dalam pemilihan pemimpin dan wakil rakyat. Demokrasi yang dikembangkan di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila.

Figur

Sumber : *www.librarising.com*

Abraham Lincoln ialah salah seorang tokoh yang mengartikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Sumber: *www.pks-jaksel.or.id*

Gambar 2.1
Pelaksanaan Pemilu biasanya diawali dengan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh setiap partai politik.

1. Pemilihan Umum

Bagi negara-negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, pemilihan umum (*general election*) merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala sesuai dengan peraturan yang ada.

Peserta pemilu dapat bersifat lembaga atau perorangan. Peserta pemilu disebut perorangan jika yang dicalonkan adalah bersifat pribadi. Adapun kelembagaan adalah yang biasa dikenal dengan partai politik, yaitu organisasi yang secara sengaja dibentuk untuk tujuan-tujuan yang bersifat politik, seperti untuk kepentingan pemilu dan kegiatan politik lainnya.

Pemilu diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakilnya, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan kabupaten/kota. Pemilu perlu diselenggarakan secara berkala dikarenakan beberapa hal sebagai berikut.

a. Menyalurkan pendapat rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat yang berkembang dari waktu ke waktu.
b. Kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah, baik karena pengaruh dunia internasional ataupun karena faktor dalam negeri sendiri.
c. Perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dimungkinkan terjadi karena pertambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa.
d. Pemilihan umum perlu diadakan teratur untuk menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik eksekutif maupun legislatif.

Asas Pemilu yang berlaku di Indonesia meliputi:

a. langsung, artinya rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung.
b. umum, artinya semua warga negara yang telah memenuhi syarat berhak mengikuti Pemilu.
c. bebas, artinya setiap warga negara berhak memilih calon sesuai dengan hati nuraninya.
d. rahasia, artinya setiap pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun.
e. jujur dan adil (jurdil) artinya pemilu harus dilaksanakan secara jujur dan adil.

Adapun tujuan dari penyelenggaraan pemilihan umum ada empat, yaitu sebagai berikut.

a. Untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negara.

Pesan Budi Pekerti

Negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan baik apabila setiap warga negara turut mendukung terlaksananya proses demokrasi dalam berpolitik sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan hak asasi rakyat.

b. Untuk memungkinkan terjadinya proses peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
c. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
d. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.

Kegiatan pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat mendasar (prinsipil). Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara maka sudah menjadi keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Adapun pelaksanaan Pemilu di Indonesia dilaksanakan setiap lima tahun sekali yang meliputi proses pendaftaran peserta Pemilu, penetapan, pemungutan suara sampai penetapan hasil Pemilu.

Hak-hak politik rakyat untuk menentukan jalannya pemerintahan dan fungsi-fungsi negara dengan benar menurut UUD adalah hak rakyat yang sangat mendasar. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemilu, di samping merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, juga merupakan sarana pelaksanaan hak asasi warga negara sendiri dalam bidang politik. Untuk itulah, diperlukan pemilihan umum untuk memilih para wakil rakyat secara rutin.

Ayo, Berlatih

Diskusikan dengan temanmu. Apa saja manfaat pemilu bagi bangsa Indonesia? Kemudian, laporkan hasilnya pada gurumu.

Sumber: *Media Indonesia,* 9 Agustus 2007

Gambar 2.2

Memberikan hak yang sama kepada setiap warga negara dalam menyalurkan hak pilihnya adalah salah satu bentuk penegakan hak berpolitik dari pemerintah kepada warga negara.

Ayo, Berlatih

Diskusikan dengan temanmu. Hal dasar apakah yang membedakan antara sistem mekanis dan organis? Ikuti petunjuk yang diberikan oleh gurumu dan laporkan hasilnya.

Demikian pula di lembaga eksekutif, rakyat sendirilah yang harus memilih presiden, gubernur, bupati dan walikota untuk memimpin jalannya pemerintahan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun tingkat kabupaten atau kota. Pemilu merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam negara demokrasi untuk memilih pemimpin. Oleh karena itu, partisipasi rakyat secara sukarela dan penuh tanggung jawab sangat diharapkan.

Sistem Pemilu yang diterapkan di Indonesia adalah sebagai berikut.

a. Sistem Mekanis dan Organis

Sistem pemilihan umum berbeda satu sama lain, bergantung dari sudut mana hal itu dilihat. Dari sudut kepentingan rakyat, apakah rakyat dipandang sebagai individu yang bebas untuk menentukan pilihannya dan sekaligus mencalonkan dirinya sebagai calon wakil rakyat. Apakah rakyat hanya dipandang sebagai anggota kelompok yang sama sekali tidak berhak menentukan siapa yang akan menjadi wakilnya di lembaga perwakilan rakyat. Apakah rakyat juga tidak berhak untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.

Gambar 2.3

Setiap orang yang dipilih menjadi wakil rakyat melalui Pemilu wajib menampung aspirasi rakyat dengan baik.

Sumber: *www.dpr.go.id*

Sistem pemilihan mekanis mencerminkan pandangan yang bersifat mekanis yang melihat rakyat sebagai massa individu yang sama. Sementara itu, dalam sistem pemilihan yang bersifat organis, menempatkan rakyat sebagai

sejumlah individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan rumah tangga, keluarga, fungsi tertentu (ekonomi, industri), lapisan-lapisan sosial (buruh, tani, cendekiawan), dan lembaga-lembaga sosial (universitas).

Menurut sistem mekanis, lembaga perwakilan rakyat merupakan lembaga perwakilan kepentingan umum rakyat seluruhnya. Adapun menurut sistem organis, lembaga perwakilan rakyat mencerminkan perwakilan dari berbagai kepentingan khusus persekutuan-persekutuan hidup masing-masing.

b. Sistem Distrik dan Proporsional

Sistem Distrik dan proporsional biasa dilaksanakan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut.

1) Sistem Perwakilan Distrik/Mayoritas

Wilayah negara dibagi dalam distrik atau daerah-daerah pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota lembaga perwakilan rakyat yang diperlukan untuk dipilih. Misalnya, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan 500 orang maka wilayah negara dibagi menjadi 500 distrik atau daerah pemilihan.

2) Sistem Perwakilan Berimbang/Proporsional

Persentase kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada setiap partai politik, sesuai dengan persentase jumlah suara yang diperoleh setiap partai politik. Umpamanya, jumlah pemilih yang sah pada suatu Pemilihan Umum mencapai 1.000.000 orang. Jumlah kursi di lembaga perwakilan rakyat 100 kursi, berarti untuk satu orang wakil rakyat dibutuhkan suara 10.000 suara.

Pesan Budi Pekerti

Harus ada ketegasan dalam sistem Pemilu untuk melaksanakan pemilihan yang seimbang sehingga peserta Pemilu mempunyai kesempatan untuk berkompetisi sesuai aturan.

Indonesia menggabungkan sistem distrik dan sistem perwakilan berimbang (proporsional) untuk meminimalkan kelemahan dari kedua sistem tersebut. Penggabungan ini mewakili ciri-ciri dari setiap sistem tersebut sehingga dikenal istilah sistem semidistrik atau proposional dengan daftar calon terbuka. Dengan sistem proposional, kemungkinan terbuangnya sisa suara sebagai salah satu kelemahan dari sistem distrik dapat dihindari. Adapun dengan sistem distrik, kemungkinan ketidaktahuan para pemilih terhadap kualitas calon wakil rakyat sebagai salah satu kelemahan dari sistem

Wawasan

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu wujud penerapan Demokrasi Pancasila yang mencerminkan adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat.

proporsional dapat dihindari. Digabungkannya kedua sistem tersebut dapat melahirkan kelebihan yang menutupi kelemahan dari masing-masing sistem Pemilu.

2. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan ruang yang luas bagi pembelajaran demokrasi di tingkat lokal (daerah). Sebagai arena pembelajaran demokrasi, Pilkada langsung diharapkan akan membawa banyak manfaat bagi perkembangan demokrasi, tatanan pemerintahan daerah, dan kinerja lembaga-lembaga politik yang ada di daerah.

Ada tiga tujuan mendasar mengapa pilkada diselenggarakan secara langsung. Tujuan tersebut, yaitu sebagai berikut.

a. Untuk membangun demokrasi tingkat lokal. Melalui pilkada secara langsung diharapkan aspirasi dan kesejahteraan rakyat langsung tertangani oleh kepala daerah terpilih.
b. Untuk menata dan mengelola pemerintahan daerah (*local democratic governance*), semakin baik dan sejalan dengan aspirasi serta kepentingan rakyat.

Gambar 2.4
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung merupakan sarana demokrasi untuk memilih pemimpin yang berkualitas.

Sumber: *www.gerbangjabar.go.id*

c. Untuk mendorong bekerjanya lembaga-lembaga politik lokal. Melalui pilkada secara langsung diharapkan lembaga-lembaga politik lokal dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan rakyat.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, partai-partai politik menyiapkan kader-kadernya untuk dimajukan dalam ajang pilkada secara langsung. Mengingat kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat maka partai-partai politik harus mencari calon kepala daerah yang memiliki peluang besar untuk dipilih dan mampu melaksanakan tujuan tersebut.

Calon yang dimajukan oleh partai politik, dihasilkan melalui proses pendaftaran calon anggota yang biasanya didahului oleh survei terhadap para tokoh di daerah tersebut. Pasangan calon anggota yang mengikuti Pilkada dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Adapun menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, calon perseorangan juga dapat mengajukan diri sebagai calon.

Sumber: *www.gerbangjabar.go.id*

Gambar 2.5
Pelaksanaan otonomi daerah mengharuskan setiap pemimpin daerah memiliki tanggung jawab untuk memajukan potensi daerahnya masing-masing.

Dalam pelaksanaan Pilkada, tak bisa dipungkiri bahwa keberadaan dan peran media massa (surat kabar, televisi, dan radio) mendukung suksesnya proses dan pelaksanaan Pilkada. Penggambaran calon dan penyampaian pesan secara lebih efektif dapat dilakukan melalui media massa, khususnya dalam memengaruhi pemilih dalam kampanye.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diatur mengenai persyaratan calon dan tahapan Pilkada. Adapun tahapan Pilkada di antaranya meliputi: pendataan peserta pemilih, penetapan bakal calon, proses pemilihan hingga penetapan hasil Pilkada.

Mengenal Bahasa Inggris

Kebijakan = *Policy*
Pemimpin = *Leader*
Pemilihan = *Election*
Proses = *Process*
Pemerintah = *Government*

Ayo, Berlatih

Diskusikan dengan temanmu. Bagaimana jika sebuah daerah dipimpin oleh seseorang yang memiliki kasus hukum? Tulis alasannya, kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.

Semua tahapan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai pelaksana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di setiap daerah yang ada di Indonesia.

Setiap calon kepala daerah tentunya harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan oleh KPUD. Adapun persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sesuai dengan Pasal 58 UU No. 32 Tahun 2004, di antaranya sebagai berikut.

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Setia kepada Pancasila, UUD 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat.
d. Usia sekurang-kurangnya 30 tahun.
e. Sehat jasmani dan rohani.
f. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap karena tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih.

UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pesta demokrasi lokal yang disebut Pilkada memerlukan persiapan paling tidak 180 hari atau 6 bulan. Beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum pilkada yaitu sebagai berikut.

a. Masa persiapan yang meliputi pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai masa berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
b. Tahap perencanaan penyelenggaraan, pembentukan panitia pengawas (Panwas), Panitia Pemilu Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Ketua Panitia Pemilihan Sementara (KPPS), pemberitahuan dan pendaftaran pemantau KPUD.
c. Tahap pengumuman yang dilakukan empat bulan sebelum pencoblosan, selain itu juga dilakukan pendaftaran calon, pemeriksaan calon, penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut calon yang dilakukan dengan undian.
d. Lalu satu bulan sebelum hari pencoblosan, dimulai masa kampanye yang berlangsung selama 14 hari. Dilanjutkan dengan masa tenang serta pencoblosan suara.

Wawasan

Pilkada merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melaksanakan haknya secara langsung dalam berpolitik.

Sumber: *www.wordpress.com*

Gambar 2.6

Penyelengaraan kampanye sabagai salah satu cara untuk menarik perhatian dan dukungan rakyat.

e. Kemudian dilanjutkan penghitungan suara secara berjenjang dari tingkat TPS sampai dengan penetapan hasil Pilkada pada tingkat daerah penyelenggaraan Pilkada (KPUD).

Sumber: *www.jakarta.go.id*

Gambar 2.7

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) bertanggung jawab dalam lancarnya pelaksanaan Pilkada.

Di tingkat provinsi, Pilkada dilaksanakan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di provinsi setempat. Adapun di tingkat kota dan kabupaten, Pilkada dilaksanakan untuk memilih walikota dan bupati beserta wakilnya dalam satu paket pasangan. Mereka memiliki tugas dan kewenangan dalam memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan DPRD.

Latihan Mandiri

Kerjakan pada buku tugasmu.

Tulislah nama-nama petugas dan jabatannya dalam pelaksanaan Pilkada di daerahmu, kemudian jelaskan kewajiban mereka. Jika kamu mengalami kesulitan dalam pengerjaan tugas ini, bertanyalah kepada guru atau orangtua kalian. Laporkan hasilnya kepada gurumu.

No.	Nama dan Jabatan Petugas Pilkada	Kewajiban
1.	____________ ____________ **Jabatan:** ____________ ____________	____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
2.	____________ ____________ **Jabatan:** ____________ ____________	____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
3.	____________ ____________ **Jabatan:** ____________ ____________	____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
4.	____________ ____________ **Jabatan:** ____________ ____________	____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
5.	____________ ____________ **Jabatan:** ____________ ____________	____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

B Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia

Dalam sebuah kehidupan manusia di mana pun berada di muka bumi ini tidak akan lepas dari kepemimpinan pemerintahan. Itulah sebabnya syarat-syarat negara salah satunya harus ada pemerintahan dan pengakuan kepada pemerintahan tersebut, di samping keberadaan wilayah dan penduduk. Kalau tidak ada pemerintahan bagaimana mungkin berbagai kasus perkelahian, pencurian, perjudian, bahkan juga peperangan dapat ditertibkan.

Pemerintah memang sangat dibutuhkan dalam berdirinya negara. Negara tidak mungkin muncul tanpa kemudian diikuti oleh berdirinya lembaga pemerintahan.

Pemerintahan di dunia ini berbeda-beda. Perbedaan ini karena setiap negara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda pula.

Dalam hubungan ini dikenal adanya tiga sistem pemerintahan negara, yaitu sebagai berikut.

Wawasan

Negara memerlukan sebuah pemerintahan untuk menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara negara agar mampu memenuhi kesejahteraan rakyat.

1. Sistem Pemerintahan Presidensil

Sistem pemerintahan dikatakan bersifat presidensil apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

a. Kedudukan kepala negara tidak terpisah dari jabatan kepala pemerintahan.
b. Kepala pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen, tetapi langsung bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya.
c. Presiden tidak berhak membubarkan parlemen.
d. Kabinet sepenuhnya bertanggung jawab kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan administrator tertinggi.

Dalam sistem presidensil, tidak dibedakan apakah presiden kepala negara atau kepala pemerintahan. Namun, yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja dengan segala hak dan kewajibannya atau tugas dan kewenangannya masing-masing.

Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensil. Dalam sistem ini para menteri bertanggung jawab kepada presiden. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Presiden memiliki hak untuk mengangkat menteri-menteri sebagai pembantu presiden, hak ini dikenal dengan sebutan hak prerogatif.

Gambar 2.8
Selain sebagai kepala negara, Presiden Republik Indonesia juga berperan sebagai kepala pemerintahan.

Sumber: *www.presidenri.go.id*

2. Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem pemerintahan itu dikatakan bersifat parlementer apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

a. Sistem kepemimpinannya terbagi dalam jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai dua jabatan yang terpisah.
b. Kabinet dapat dibubarkan apabila tidak mendapat dukungan parlemen.
c. Parlemen dapat dibubarkan oleh pemerintah jika dianggap tidak dapat memberikan dukungan kepada pemerintah.

Ayo, Berlatih

Diskusikan dengan temanmu. Bagaimana cara mewujudkan sistem pemerintahan yang baik bagi Indonesia? Kemudian, laporkan hasilnya kepada gurumu.

3. Sistem Pemerintahan Campuran

Sementara itu, dalam sistem campuran terdapat ciri-ciri presidensil dan parlementer secara bersamaan dalam sistem pemerintahan yang diterapkan.

Presiden berkedudukan sebagai kepala negara yang dipilih oleh rakyat, tetapi juga ada kepala pemerintahan yang dipimpin oleh perdana menteri yang didukung oleh parlemen seperti dalam sistem parlementer biasa.

Tahukah kamu, tidak semua rakyat dapat dan mampu menyampaikan suaranya maka dibuatlah lembaga perwakilan yang disebut dengan parlemen. *parle* yang artinya bicara. Inilah kemudian yang dianggap sebagai badan legislatif yang dibentuk seimbang dengan badan eksekutif. Badan legislatif inilah yang membuat peraturan, sedangkan badan eksekutif yang menjalankannya.

Struktur lembaga negara yang dimiliki oleh Negara Indonesia adalah sebagai berikut.

Susunan Lembaga Negara RI
Sebelum Amandemen UUD 1945
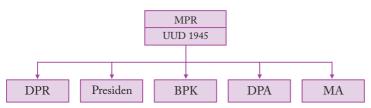
Susunan Lembaga Negara RI
Setelah Amandemen UUD 1945
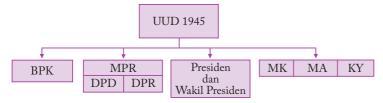
Sumber: *UUD 1945 Amandemen Keempat*

Melalui lembaga perwakilan, rakyat dapat menyalurkan aspirasinya dengan tata cara yang tertib dan teratur berdasarkan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, aspirasi antar-warga negara tidak saling berbenturan.

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

MPR merupakan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum. MPR memiliki kedudukan yang setara dengan lembaga negara lain, seperti DPR, DPD, BPK, MA, MK dan KY.

Lembaga negara ini tidak lagi mengeluarkan ketetapan MPR, oleh karena itu saat ini ketetapan MPR (TAP MPR) tidak lagi menjadi bagian dari tata urutan dalam peraturan perundang-undangan. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan ketika anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji jabatannya.

Sumber : *www.pks-jogja.com*

Hidayat Nur Wahid ialah ketua MPR RI periode 2004–2009.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 2 ayat (3) bahwa segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak. Namun sebelum mengambil putusan dengan suara terbanyak terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Saat ini MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN.

Menurut UUD 1945 Pasal 3 bahwa tugas-tugas MPR adalah sebagai berikut.

1) Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar.
2) Melantik presiden dan wakil presiden.
3) Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar.

Gambar 2.9

Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berada di Jakarta merupakan gedung rakyat tempat para wakil rakyat bersidang.

Sumber: *Republika*, 23 Juli 2007

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Lembaga ini disebut parlemen karena kata *parle* berarti bicara. Artinya, mereka harus menyuarakan hati nurani rakyat. Setelah menampung dan mempertimbangkan kepentingan rakyat, mereka harus membicarakan dalam sidang parlemen kepada pemerintah yang berkuasa. Oleh karena itu, DPR dibentuk di pusat untuk mengawasi pemerintah pusat, dibentuk di daerah untuk mengawasi pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Jadi lembaga eksekutif mempunyai peranan mengurus, sedangkan legislatif mempunyai fungsi mengatur. Dengan demikian, untuk membantu mengawasi pelaksanaan tugas kepala daerah, di daerah provinsi ataupun kabupaten/kota

dibentuk lembaga legislatif tingkat daerah yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota.

Sumber: *www.dkp.go.id*

Gambar 2.10
Anggota DPR memiliki beberapa hak istimewa untuk menunjang tugasnya sebagai wakil rakyat.

Untuk menjamin pelaksanaan tugas-tugasnya, DPR diberi berbagai hak dan kewajiban oleh UUD 1945, yaitu sebagai berikut.

- Hak petisi (hak untuk mengajukan pertanyaan bagi setiap anggota).
- Hak budget (untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah).
- Hak interpelasi (untuk meminta keterangan terutama pada eksekutif).
- Hak amandemen (untuk mengadakan perubahan peraturan).
- Hak angket (untuk mengadakan penyelidikan karena diduga terlibat kasus).
- Hak inisiatif (untuk mengajukan rancangan undang-undang).
- Hak prakarsa (hak untuk mengajukan pernyataan pendapat).

Adapun kewajiban DPR, yaitu sebagai berikut.

- Mempertahankan Pancasila dan UUD 1945.
- Menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah.
- Memerhatikan aspirasi rakyat.

Diskusikan dengan temanmu. Bagaimana kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sebuah negara? Kemudian, laporkan hasilnya kepada gurumu.

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa anggota DPR sudah pasti adalah juga anggota MPR. Kemudian dalam rangka memperlancar tugasnya DPR mempunyai alat kelengkapan, yaitu sebagai berikut.

1) Pimpinan DPR

Pimpinan DPR terdiri atas ketua dan beberapa wakil ketua yang dipilih anggota DPR RI itu sendiri dengan cara pemilihan yang diatur dalam peraturan tata tertib DPR yang dibuat DPR sendiri. Setiap anggota DPR harus tergabung ke dalam salah satu fraksi yang dibentuk oleh DPR. Fraksi dibentuk untuk bertugas meningkatkan kemampuan yang tercermin dalam setiap kegiatan DPR dan fraksi berbeda dengan komisi.

Gambar 2.11

Setiap anggota fraksi di DPR diberi tugas menyelesaikan berbagai permasalahan rakyat dalam sebuah sidang.

Sumber: *www.dpr.go.id*

2) Komisi-Komisi

Komisi adalah pengelompokan anggota DPR yang terdiri atas satu bidang keahlian dan tugas yang ditetapkan sendiri oleh DPR dengan surat keputusan. Tugas komisi meliputi bidang perundang-undangan, anggaran, pengawasan. Untuk melaksanakan tugasnya komisi dapat melakukan dengar pendapat, rapat kerja, mengajukan pertanyaan dan kunjungan kerja atau jika perlu memanggil aparat pemerintah atau masyarakat umum, baik atas permintaan komisi maupun pihak lain.

3) **Badan Musyawarah**

Badan Musyawarah bertugas menetapkan acara-acara DPR dalam satu tahun masa persidangan, memberikan pertimbangan kepada pimpinan, menetapkan pokok-pokok kebijaksanaan DPR dan tugas lain yang diserahkan.

4) **Badan Urusan Rumah Tangga**

Pimpinan DPR bertugas memimpin rapat untuk menyimpulkan persoalan yang dibicarakan, menentukan kebijakan anggaran belanja, serta menyusun rencana kerja DPR, yaitu dengan membagikan pekerjaan antara ketua dan wakil ketua dengan mengumumkan secara terbuka dalam rapat paripurna.

Adapun keberadaan komisi yang ada di DPR, yaitu sebagai berikut.

No.	Komisi	Bidang yang dibahas
1.	I	Bidang luar negeri, pertahanan, dan informasi
2.	II	Pemerintahan, otonomi daerah, dan aparatur negara
3.	III	Bidang hukum dan keamanan
4.	IV	Bidang pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan
5.	V	Bidang perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum
6.	VI	Bidang industri, perdagangan, investasi, dan BUMN
7.	VII	Bidang pertambangan dan lingkungan hidup
8.	VIII	Bidang sosial, agama, dan pemberdayaan perempuan
9.	IX	Bidang kesehatan dan tenaga kerja
10.	X	Bidang pendidikan, pemuda, dan olah raga
11.	XI	Bidang keuangan dan perbankan
12.	XII	Seputar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Ayo, Berlatih

Diskusikan dengan teman sebangkumu. Mengapa rakyat Indonesia harus memiliki wakil rakyat? Kemudian, laporkan hasilnya kepada gurumu.

Mengenal Bahasa Inggris

Kekuasaan = *Power*
Menteri = *Minister*
Negara = *State*
Perjanjian = *Agreement*
Parlemen = *Parliament*

c. Presiden dan Wakil Presiden

Wewenang dan kekuasaan presiden Republik Indonesia, dibagi dua jenis, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Gambar 2.12

Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Jusuf Kalla ialah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih pada Pemilu Presiden 2004.

Sumber: *www.sby-jk.com*

Tugas dan tanggung jawab sebagai kepala negara meliputi hal-hal yang bersifat kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan. Jadi, mirip dengan kewenangan para kaisar dan ratu pada beberapa negara lain, tetapi tidak berkenaan dengan kewenangan penyelenggaraan roda pemerintahan.

Kekuasaan dan kewenangan kepala negara tersebut, meliputi hal-hal berikut.

1) Melangsungkan perjanjian dengan negara lain.
2) Mengadakan perdamaian dengan negara lain.
3) Menyatakan negara dalam keadaan bahaya.
4) Mengumumkan perang terhadap negara lain.
5) Mengangkat, melantik, dan memberhentikan duta serta konsul untuk negara lain.
6) Menerima surat kepercayaan dari negara lain melalui duta dan konsul negara lain.
7) Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan tingkat nasional lainnya.
8) Menguasai angkatan laut, darat, udara dan kepolisian.

Kekuasaan dan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan adalah karena fungsinya sebagai penyelenggara tugas eksekutif, meliputi:

1) memimpin kabinet;
2) mengangkat dan melantik menteri-menteri;

Wawasan

Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung. Hal ini sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Sumber: *www.ind-2.com*

Gambar 2.13
Presiden berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.

3) mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
4) membentuk, mengubah, dan membubarkan kementerian negara yang diatur dalam undang-undang.

Presiden RI juga mempunyai kekuasaan sebagai berikut.

1) Mengajukan rancangan undang-undang.
2) Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
3) Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang.
4) Memberikan Grasi (pengurangan atau pengampunan hukuman). Grasi, yaitu hak untuk memberikan pengurangan hukum atau pengampunan dan pembebasan hukuman sama sekali. Sebagai contoh yaitu mereka yang mendapat hukuman mati dikurangi menjadi hukuman seumur hidup.
5) Memberikan Abolisi (penghentian tuntutan pidana). Abolisi, yaitu hak untuk memberikan pernyataan bahwa hukuman tuntutan pidana harus digugurkan atau suatu tuntutan pidana yang telah dimulai harus dihentikan. Sebagai contoh mereka yang dijadikan tersangka telah melakukan pemberontakan, dibatalkan sebelum diadili.
6) Memberikan Amnesti (pembatalan hukuman). Amnesti, yaitu hak untuk memberikan pernyataan bahwa hukuman tuntutan pidana yang telah dijatuhkan,

Figur

Sumber : *www.presidenri.com*

Megawati Soekarno Putri ialah presiden wanita pertama RI (2001–2004).

harus dibatalkan. Sebagai contoh, yaitu mereka yang pernah dituduh melakukan tindakan memberontak terhadap negara dibatalkan sesudah diadili.

7) Memberikan Rehabilitasi (pemulihan nama baik seseorang). Rehabilitasi, yaitu hak untuk memberikan pernyataan pengembalian nama baik seseorang. Sebagai contoh, yaitu mereka yang pernah dihukum sehingga nama baiknya tercemar. Akibat adanya kesalahan dalam proses hukum, mereka kemudian direhabilitasi nama baiknya melalui sebuah pernyataan.

Tahukah kamu bahwa presiden RI sudah enam kali berganti sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu:

1) Ir. Soekarno (1945–1966);
2) Jend. TNI (Purn) Soeharto (1966–1998);
3) Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie (1998–1999);
4) K.H. Abdurrahman Wahid (1999–2001);
5) Megawati Soekarno Putri (2001–2004);
6) Jend. TNI (Purn.) Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, MA (2004–2009).

Dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Baik presiden atau wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu. Masa jabatan presidan dan wakil presiden adalah lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Jika presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Jadi, wakil presiden harus dapat bekerja sama dengan presiden. Secara umum tugas dan wewenang wakil presiden adalah sebagai berikut.

1) Membantu presiden dalam melakukan kewajibannya.
2) Memperhatikan secara khusus, menampung masalah-masalah dan mengusahakan pemecahannya yang menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat.
3) Melakukan pengawasan terhadap pembangunan.
4) Menggantikan presiden sampai habis waktunya jika presiden berhalangan tetap.

Ayo, Berlatih

Diskusikan dengan temanmu. Siapakah presiden RI yang paling singkat masa jabatannya? Berikan alasanmu, kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.

Sumber: *www.imageshacks.com*

Gambar 2.14

Presiden Soeharto digantikan oleh Wakil Presiden B. J. Habibie setelah munculnya gerakan reformasi.

Wakil Presiden RI sudah mengalami pergantian sebanyak sepuluh kali, yaitu:

1) Drs. Mohammad Hatta (1945–1956);
2) Sri Sultan Hamengkubowono IX (1973–1978);
3) Adam Malik (1978–1983);
4) Jenderal TNI (Purn.) Umar Wirahadikusumah (1983–1988);
5) Letjen TNI (Purn.) Sudharmono, SH. (1988–1993);
6) Jend. TNI (Purn.) Try Sutrisno (1993–1998);
7) Prof. Dr. Ing B.J. Habibie (1998–1998);
8) Megawati Soekarno Putri (1999–2001);
9) Hamzah Haz (2001–2004);
10) Drs. Jusuf Kalla (2002–2009).

Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang merupakan peserta dari pemilihan umum.

Pesan Budi Pekerti

Presiden dan wakil presiden harus menjadi pasangan pemimpin yang mampu bekerja sama dengan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

d. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung (MA) merupakan salah satu lembaga tinggi negara di republik Indonesia yang merupakan pengadilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Dalam melaksanakan tugasnya, MA harus dapat terlepas dari pengaruh pemerintah (eksekutif) dan pengaruh-pengaruh lainnya.

Gambar 2.15
Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berada di Jakarta.

Sumber: *www.googleimage.com*

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki kekuasaan dalam beberapa hal, yaitu sebagai berikut.

1) Memutuskan permohonan kasasi berupa pembatalan terhadap putusan hakim yang dianggap menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang.
2) Memeriksa dan memutuskan sengketa tentang kewenangan mengadili.
3) Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap.

Ada empat fungsi pokok yang dijalankan Mahkamah Agung, yaitu fungsi pengadilan, fungsi pengawasan, fungsi pengaturan, dan fungsi pemberian nasihat. Akibat kekuasaan kehakiman yang ada pada Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya adalah kekuasaan yang bebas, dalam arti bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, maka kedudukan Mahkamah Agung dijamin oleh undang-undang.

Mahkamah Agung senantiasa harus memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum baik diminta atau tidak, kepada semua lembaga tinggi negara lainnya, terutama kepada presiden.

Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden selaku kepala negara.

Susunan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut.

1) Seorang ketua Mahkamah Agung.
2) Seorang wakil ketua Mahkamah Agung.
3) Beberapa orang ketua muda.

4) Hakim anggota, yaitu hakim agung.
5) Panitera dan panitera pengganti.

Ketua Mahkamah Agung juga dapat mengambil sumpah/ janji Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagaimana yang dilaksanakan Presiden. Secara umum fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara dengan segala kewenangannya, sangat bebas dan tidak bergantung pada pihak lain. Keputusannya tidak boleh dipengaruhi oleh lembaga tinggi lain.

e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tinggi negara Republik Indonesia yang bertugas memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, kekayaan negara, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta daerah, anggaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan daerah yang berdasarkan atas ketentuan undang-undang.

Badan Pemeriksa Keuangan berwenang untuk meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan/ instansi baik pemerintah maupun swasta, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Sumber: *www.google.image.com*

Gambar 2.16
Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berada di Jakarta.

Ada tiga fungsi pokok yang dijalankan Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu sebagai berikut.

1) Fungsi operatif (melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan).

BPK harus menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang mandiri serta bebas dari pengaruh dan kekuasaan lembaga lainnya, agar fungsinya sebagai lembaga negara yang mandiri dapat berjalan dengan baik sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara.
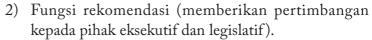
2) Fungsi rekomendasi (memberikan pertimbangan kepada pihak eksekutif dan legislatif).
3) Fungsi yudikatif (menyelenggarakan proses tuntutan perbendaharaan).

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan berkewajiban untuk memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada pihak legislatif (DPR, DPD, dan DPRD). Perbuatan yang merugikan keuangan negara khususnya persoalan pidana disampaikan kepada Kepolisian dan Kejaksaan.

Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 23E ayat (1) bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh presiden. Susunan Badan Pemeriksa Keuangan adalah sebagai berikut:

1) Seorang ketua merangkap anggota;
2) Seorang wakil ketua merangkap anggota;
3) Lima orang anggota.

f. Mahkamah Konstitusi (MK)

Setelah reformasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki satu lagi lembaga tinggi negara yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung, berserta badan peradilan yang berada di bawahnya.

Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa kewenangan, yaitu :

1) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final;
2) untuk menguji undang-undang terhadap UUD;
3) untuk memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, yang kewenangannya diberikan UUD;
4) memutuskan pembubaran partai politik;
5) untuk memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Diskusikan dengan temanmu. Bagaimana latar belakang terbentuknya Mahkamah Konstitusi? Kemudian, laporkan hasilnya kepada gurumu.

Sumber: *Gatra*, 3 Januari 2007

Gambar 2.17
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakil presiden menurut UUD. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan anggota hakim konstitusi yang di tetapkan oleh presiden berdasarkan pengajuan dan usulan dari MA, DPR, dan presiden yang masing-masing lembaga mengajukan usulan sebanyak tiga orang. Masa jabatan hakim konstitusi adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali unuk satu kali masa jabatan.

Ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Hakim konstitusi harus memiliki integritas kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, serta menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Hakim konstitusi tidak boleh merangkap sebagai pejabat pada lembaga negara lainnya.

Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Mahkamah Konstitusi beranggotakan sembilan Hakim Konstitusi. Kesembilan hakim tersebut berasal dari tiga anggota diajukan oleh Mahkamah Agung (MA), tiga anggota diajukan oleh DPR, dan tiga anggota lainya diajukan oleh presiden.

Gambar 2.18
Kekuasaan kehakiman dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan.

Sumber: *www.mahkamahkonstitusi.com*

Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum yang menentukan proses pengadilan dalam penyelesaian sengketa (hukum acara) dalam Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

g. Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang merangkap anggota.

Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) orang anggota. Adapun wewenang yang dimiliki Komisi Yudisial, yaitu:

1) mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
2) menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR.

Komisi yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU No. 22 Tahun 2004 yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung.

Latihan Mandiri

Kerjakan pada buku tugasmu.
Tulislah tugas dari lembaga-lembaga negara di Indonesia yang kamu ketahui. Kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.

No	Tugas Lembaga Negara di Indonesia
1.	Presiden dan wakil presiden: ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________
2.	Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR): ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________
3.	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________
4.	Dewan Perwakilan Daerah (DPD): ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________
5.	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________
6.	Kekuasaan Kehakiman (MA, MK, KY): ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________

C Tugas dan Fungsi Pemerintahan

1. Tugas dan Fungsi Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat yaitu presiden, wakil presiden, dan para menteri di bawahnya yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka pemerintah pusat melakukan tugasnya dengan mengelola kekayaan milik negara untuk dipergunakan bagi kepentingan umum guna memenuhi hajat hidup orang banyak, hal ini sejalan dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) bahwa "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara" dan ayat 3 yang berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Terdapat lima hal yang menjadi urusan pemerintah pusat, yaitu sebagai berikut.

a. Politik Luar Negeri
   Negara mengambil bagian dalam menentukan politik dan kebijakan luar negeri yang akan diambil untuk memenuhi kepentingan nasional dalam lingkup internasional.

b. Pertahanan Keamanan
   Negara berperan aktif dalam pertahanan nasional dengan mengambil bagian atas seluruh tugas-tugas perlindungan negara dan warga negara terhadap serangan-serangan luar.

d. Yustisi (Peradilan)
   Negara berupaya mencegah terjadinya konflik kepentingan antara individu dan kelompok.

e. Moneter (keuangan) dan Fiskal Nasional
   Negara mengupayakan kebaikan bersama dan kesejahteraan umum.

f. Agama
   Negara memberikan kesempatan mengembangkan dengan bebas hak beragama yang ada dalam kelompok secara terkendali.

Ayo, Berlatih

Diskusikan dengan temanmu. Mengapa pemerintah pusat harus memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah? Kemudian, laporkan hasilnya kepada gurumu.

Pesan Budi Pekerti

Pemerintah mengemban tugas penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, seluruh warga negara harus memberikan dukungan bagi terciptanya negara yang makmur dan sejahtera .

Kekuasaan dan kewenangan kepala negara tersebut, meliputi beberapa hal, di antaranya sebagai berikut.

a. Memegang kekuasan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
b. Menyatakan perang dan membuat perdamaian serta perjanjian dengan negara lain.
c. Membuat perjanjian internasional.
d. Menyatakan keadan bahaya.
e. Mengangkat duta atau konsul.
f. Memberi grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi.
g. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainya.

Sumber: *www.presidenri.go.id*

Gambar 2.19
Pemberian gelar atau tanda jasa merupakan salah satu wujud dari kewenangan yang dimiliki Presiden.

Presiden memiliki kekuasaan dan kewenangan yang meliputi beberapa hal, di antaranya:

a. memimpin kabinet;
b. mengangkat dan melantik menteri-menteri;
c. memberhentikan menteri-menteri;
d. mengawasi operasional pembangunan;
e. menerima mandat dari MPR-RI.

2. Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tertuang dalam UUD 1945.

Dengan adanya asas otonomi, maka daerah otonom memiliki hak, kewenangan, serta kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan tugas pembantuan, Pasal 1 bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai beberapa bantuan dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada yang menugaskan.

Gambar 2.20

Gedung Sate yang berada di Bandung adalah Kantor Gubernur Jawa Barat.

Sumber: *www.google.images.com*

Wawasan

Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja sama menyelenggarakan pemerintahan yang baik dengan pembagian tugas dan kewenangan tertentu sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

Tugas dan wewenang kepala daerah dan wakil kepala daerah, termuat di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 27, di antaranya sebagai berikut:

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
e. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Latihan Bersama

Kerjakan pada buku tugasmu.
Buatlah kelompok yang terdiri atas dua orang laki-laki dan dua orang perempuan. Desa/kelurahan merupakan pemerintahan yang paling rendah di Indonesia. Untuk itu, datangilah kantor desa/kelurahan yang ada di daerah kamu dan tanyakan siapa saja aparat desa/kelurahan tersebut dengan menyebutkan tugas dan namanya masing-masing. Kemudian, laporkan hasilnya kepada gurumu.

No.	Nama	Tugas Aparat Desa/Kelurahan
1.	____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________	____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________
2.	____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________	____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________
3.	____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________	____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________
4.	____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________	____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________
5.	____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________	____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________

Ringkasan Bab 2

- Dalam hubungan ini dikenal adanya tiga sistem pemerintahan negara, yaitu sebagai berikut.
  a. sistem pemerintahan presidensil
  b. sistem pemerintahan parlementer atau kabinet
  c. sistem pemerintahan campuran
- Dalam negara demokrasi, rakyat adalah pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyat yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan.
- Kegiatan pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat mendasar.
- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung diharapkan akan membawa banyak manfaat bagi perkembangan demokrasi, tatanan pemerintahan daerah, dan kinerja lembaga-lembaga politik yang ada di daerah tersebut.
- Lembaga Negara Republik Indonesia terdiri dari : MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, BPK, MA, MK, KY.

Mengukur Kemampuan

Jodohkan antara kolom kiri dengan kolom kanan sesuai dengan jawaban yang benar.

No.	Lembaga Negara		Dasar Hukum
1.	Presiden dan wakil presiden	....	a. UUD 1945, pasal 2
2.	Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)	....	b. UUD 1945, pasal 4
3.	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	....	c. UUD 1945, pasal 19
4.	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	....	d. UUD 1945, pasal 22
5.	Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	....	e. UUD 1945, pasal 23
6.	Kekuasaan Kehakiman (MA, MK, KY)	....	f. UUD 1945, pasal 24

Evaluasi Bab 2

Kerjakan pada buku tugasmu.

A. Pilihlah jawaban yang tepat.

1. Gubernur memimpin pemerintahan pusat di tingkat ....
   a. kabupaten
   b. provinsi
   c. kota
   d. daerah
2. Lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang adalah ....
   a. presiden
   b. DPR
   c. MK
   d. MA
3. Dalam menjalankan tugasnya Presiden dibantu oleh ....
   a. DPR
   b. DPD
   c. menteri
   d. hakim
4. Anggota DPRD berasal dari ....
   a. rakyat
   b. partai politik
   c. warga
   d. partai Islam
5. Peraturan Daerah (Perda) merupakan tugas dan wewenang ....
   a. DPRD
   b. DPR
   c. MPR
   d. presiden
6. Gubernur dipilih melalui ....
   a. Pilkada
   b. Pilgub
   c. Pilkades
   d. diangkat presiden
7. Pemimpin negara Indonesia disebut ....
   a. raja
   b. presiden
   c. sultan
   d. kaisar
8. Jabatan presiden berakhir setiap ....
   a. 2 tahun
   b. 4 tahun
   c. 3 tahun
   d. 5 tahun
9. Presiden ketiga negara Republik Indonesia adalah ....
   a. Abdurrahman Wahid
   b. Megawati Soekarno Putri
   c. B.J. Habibie
   d. Susilo Bambang Yudhoyono
10. Presiden dipilih oleh....
    a. MPR
    b. menteri
    c. DPR
    d. rakyat
11. Berikut ini adalah sistem pemerintahan Indonesia ....
    a. Presidensil
    b. Parlementer
    c. Campuran
    d. Kerajaan
12. Pemilihan umum diadakan dengan tujuan ....
    a. melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat
    b. pesta hura-hura
    c. memilih pemimpin yang sama
    d. memilih penyalur aspirasi rakyat

13. Sistem pemilu dengan membagi wilayah negara dalam daerah-daerah pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota perwakilan disebut ....
    a. sistem mekanis
    b. sistem organis
    c. sistem distrik
    d. sistem proporsional
14. Wakil presiden yang kedelapan ialah ....
    a. B.J. Habibie
    b. Megawati Soekarno Putri
    c. Tri Sutrisno
    d. Hamzah Haz
15. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh ....
    a. DPR
    b. rakyat
    c. MPR
    d. presiden
16. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2004–2009 ialah …
    a. Prof. Ginanjar Kartasasmita
    b. Drs. Agung Laksono
    c. Ir. Akbar Tanjung
    d. Dr. H. Hidayat Nur Wahid
17. Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2004–2009 ialah ....
    a. Adiyaksa Dault
    b. Wiranto
    c. Jimly Assiddiqie
    d. Nurdin Halid
18. Seorang menteri bertanggung jawab kepada ....
    a. presiden
    b. DPR
    c. MPR
    d. rakyat
19. Berikut ini merupakan lembaga yudikatif, yaitu ....
    a. Presiden
    b. DPR
    c. Mahkamah Agung
    d. Menteri
20. Berikut merupakan urusan pemerintah pusat adalah ....
    a. pemekaran wilayah
    b. agama
    c. APBD
    d. kesenian

B. Isilah titik-titik berikut dengan benar.

1. Kedudukan kepala negara yang tidak terpisahkan dari jabatan kepala pemerintahan disebut ....
2. Dalam sistem pemerintahan kabinet parlementer, sistem kepemimpinannya dibedakan menjadi ... dan ....
3. Peserta Pemilu dapat bersifat .... dan ....
4. Pilkada diusulkan oleh partai yang memperoleh suara pemilu legislatif sebanyak ... % di daerah tersebut.
5. Undang-undang yang mengatur tentang pemerintah daerah, yaitu ....
6. Presiden RI sudah .... kali berganti sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
7. Hak untuk meminta keterangan dari eksekutif merupakan hak DPR yang disebut ....
8. Hak untuk memberikan pernyataan bahwa hukuman tuntutan pidana harus digugurkan atau suatu tuntutan pidana yang telah dimulai harus dihentikan merupakan ....
9. Lembaga peradilan yang merupakan peradilan tertinggi adalah ....
10. Lembaga di Indonesia yang baru dibentuk setelah UUD 1945 diamandemen adalah ....

C. Jawablah pertanyaan berikut.

1. Tuliskan ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensil.
2. Mengapa Indonesia memilih sistem presidensil sebagai sistem pemerintahannya?
3. Apakah tujuan dari penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu)?
4. Menurut pendapatmu apakah rakyat perlu dilibatkan dalam pemerintahan?
5. Sistem apakah yang dipakai dalam Pemilu di Indonesia?
6. Apakah manfaat yang diperoleh dengan adanya partai politik?
7. Lembaga apa saja yang terdapat di Indonesia setelah terjadinya amandemen?
8. Mengapa sebuah negara memerlukan pemerintahan?
9. Tuliskan minimal lima presiden yang pernah menjadi pemimpin di Indonesia.
10. Masalah-masalah apakah yang dapat menghambat sistem pemerintahan di Indonesia?

Ayo, Kerjakan

Tulis dalam buku tugasmu, nama lembaga-lembaga negara Indonesia beserta ketuanya. Kemudian, berikan penjelasan apa saja tugas dan wewenang dari setiap lembaga negara tersebut.

Evaluasi Semester 1

Kerjakan pada buku tugasmu.

A Pilih jawaban yang paling tepat.

1. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan pada ....
   a. 15 Agustus 1945
   b. 16 Agustus 1945
   c. 17 Agustus 1945
   d. 18 Agustus 1945
2. Kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Sekutu pada ....
   a. 6 dan 9 Agustus 1945
   b. 6 dan 7 Agutus 1945
   c. 6 dan 8 Agustus 1945
   d. 6 dan 5 Agustus 1945
3. Pencipta lagu *Indonesia Raya* ialah ....
   a. Gesang
   b. WR. Soepratman
   c. Sajuti Melik
   d. Agus Salim
4. Istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman ....
   a. berdiri Indonesia
   b. kerajaan Hindia Belanda
   c. kerajaan Pasundan
   d. kerajaan Majapahit
5. Berikut bukan anggota Panitia Kecil yang terdiri atas 9 orang ialah ....
   a. Bung Karno
   b. Bung Hatta
   c. Soepomo
   d. Ahmad Subardjo
6. Ir. Soekarno mengusulkan lima rumusan dasar negara yang kini dikenal dengan sebutan ....
   a. UUD 1945
   b. Proklamasi
   c. Pancasila
   d. GBHN
7. *Pro patria* dan *primus patrialis*, yaitu ....
   a. selalu berjiwa untuk tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air
   b. jiwa toleransi
   c. jiwa solidaritas atau kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat
   d. jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab
8. Asas-asas yang di terima sebagai nilai kebenaran yang ada dan perlu dilestarikan merupakan pengertian dari nilai ....
   a. operasional
   b. dasar
   c. global
   d. regional
9. Nasionalisme, patriotisme, jiwa dan semangat merdeka merupakan sebagian dari nilai ....
   a. dasar
   b. global
   c. operasional
   d. regional
10. Kedudukan UUD 1945 sebagai sumber hukum artinya merupakan ....
    a. dasar hukum bagi terselenggaranya ketertiban
    b. sumber dari segala sumber hukum
    c. satu-satunya alat untuk mencapai ketertiban umum
    d. landasan bagi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

11. Presiden memiliki hak untuk memberikan pengurangan atau pengampunan dan pembebasan hukuman, dikenal dengan sebutan ....
    a. rehabilitasi
    b. grasi
    c. amnesti
    d. abolisi
12. Pemilihan umum dilakukan setiap ....
    a. 3 tahun sekali
    b. 4 tahun sekali
    c. 5 tahun sekali
    d. 6 tahun sekali
13. Berikut yang bukan termasuk sistem Pemilu di Indonesia ....
    a. mekanis
    b. distrik
    c. proporsional
    d. afektif
14. Sistem Pilkada yang dianut oleh negara Indonesia ialah ....
    a. langsung
    b. perantara
    c. tidak langsung
    d. lewat DPR
15. Untuk membangun demokrasi tingkat lokal merupakan tujuan dari diadakannya pilkada secara ....
    a. langsung
    b. perantara
    c. tidak langsung
    d. lewat DPR
16. Pasangan yang diusulkan partai politik memenuhi ketentuan perolehan suara berkisar ... di daerah.
    a. 15%
    b. 20%
    c. 25%
    d. 30%
17. Undang-undang yang mengatur tentang persyaratan dan tahapan Pilkada adalah ....
    a. UU No. 32 tahun 2004
    b. UU No. 34 Tahun 2004
    c. UUD 1945
    d. TAP MPR
18. Komisi I DPR membahas tentang bidang ...
    a. pertanian
    b. transportasi
    c. pertahanan dan keamanan
    d. hukum dan luar negeri
19. Kekuasaan Presiden RI di bidang legislatif adalah ....
    a. membuat UU
    b. memberikan grasi
    c. memberikan abolisi
    d. memberikan amnesti
20. Hak untuk memberikan pernyataan pengembalian nama baik seseorang disebut dengan ....
    a. grasi
    b. rehabilitasi
    c. abolisi
    d. amnesti

B. Isilah titik-titik berikut dengan benar.

1. Teks proklamasi diketik oleh ....
2. Istilah Pancasila dapat ditemukan dalam kitab karya ....
3. *Dokuritsu Junbi Cosakai* adalah ....
4. Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari .....
5. Piagam Jakarta sebenarnya merupakan ....

6. Rakyat, pemerintah, dan pemerintahan adalah ....
7. Kampanye politik dilakukan untuk ....
8. Parlemen merupakan ....
9. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah ....
10. Presiden dan wakil presiden dipilih untuk masa jabatan selama ....

C. Jawablah pertanyaan berikut.

1. Bagaimana proses perumusan Pancasila itu terjadi?
2. Manfaat apa yang diperoleh dengan meneladani nilai-nilai kebersamaan dan perjuangan?
3. Nilai-nilai juang apa saja yang terkandung dalam proses perumusan Pancasila?
4. Berikan contoh cara menjalankan hak sebagai warga negara yang baik.
5. Mengapa pemilu diselenggarakan secara bertahap?
6. Bagaimana kedudukan rakyat dalam sistem pemerintahan?
7. Syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang kepala daerah?
8. Bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan daerah?
9. Bagaimana peranan Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia?
10. Menurut pendapatmu, apakah lembaga-lembaga negara di Indonesia sudah menjalankan fungsinya dengan baik? Berikan alasanmu.

Portofolio

Cari sebuah berita mengenai salah satu lembaga negara Indonesia dari media cetak atau elektronik. Kemudian, jelaskan isi berita tersebut dan berikan penilaianmu terhadap lembaga negara Indonesia yang kamu dijadikan sebagai sumber berita. Kerjakan tugasmu dalam selembar kertas, kemudian kumpulkan hasilnya kepada gurumu.

Bab 3

Sumber: *www.pnri.go.id*

Peranan Indonesia di Asia Tenggara

Manfaat yang Kamu Peroleh

Kamu dapat memahami peranan Indonesia di Asia Tenggara.

Kata Penting

Kerja sama, dan ASEAN.

Negara bagaikan manusia, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Untuk itu dilakukanlah kerja sama agar negara tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasionalnya. Tahukah kamu, apa saja peranan Indonesia di Asia Tenggara? Sebelum kamu mempelajari materi bab ini secara lebih mendalam, perhatikanlah peta konsep berikut.

A. Kerja Sama Negara-Negara Asia Tenggara

B. Peran Serta Indonesia di Kawasan Asia Tenggara

Peta Konsep

Peran Indonesia di Asia Tenggara
meliputi
ASEAN
dengan anggota
Indonesia
Malaysia
Singapura
Thailand
Filipina
Brunei Darussalam
Vietnam
Myanmar
Laos
Kamboja
Prinsip Kerja Sama
antara lain
Keterbukaan
Saling Menguntungkan
Saling Menghormati
Bentuk Kerja Sama Lainnya
yaitu
ASA
ASPAC
SEATO

A Kerja Sama Negara-Negara Asia Tenggara
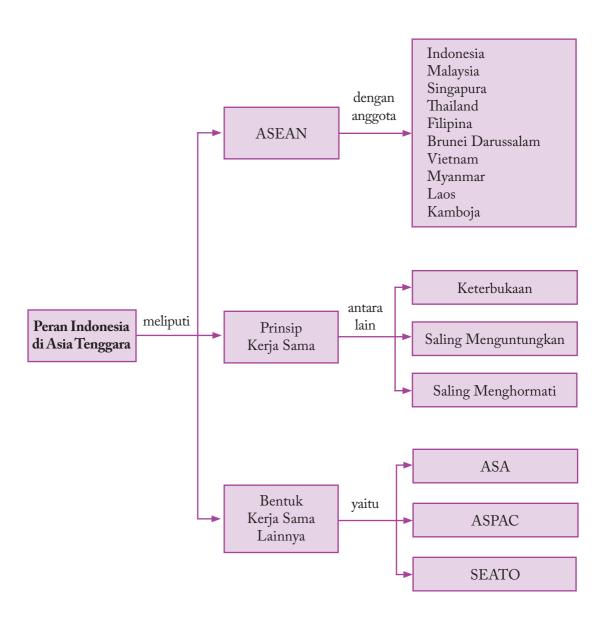
Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Selain Indonesia, negara-negara lainnya yang berada di kawasan yang sama, di antaranya Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Thailand, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste. Sebagai negara bertetangga, negara-negara tersebut senantiasa bahu membahu melakukan kerja sama antarnegara. Berbagai bentuk kerja sama tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masing-masing negara. Di samping itu, sudah selayaknya sebagai negara yang bertetangga untuk saling bantu, saling menghormati, dan hidup berdampingan antara yang satu dengan lainnya.

Ayo, Berlatih

Diskusikan dengan temanmu. Bagaimana cara menjalin kerja sama yang baik dengan negara lain? Kemudian, laporkan hasilnya kepada gurumu.

Sumber: *www.ukdw.ac.id*

Peta 3.1

Peta negara-negara di kawasan Asia Tenggara
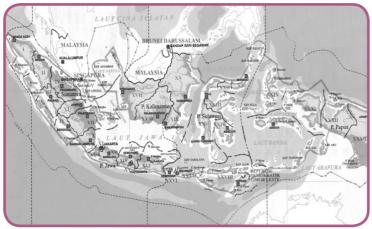
Jika dilihat dari letak geografis, Asia Tenggara merupakan kawasan yang sangat strategis karena letaknya berada di jalur perdagangan internasional. Hal tersebut menjadikan kawasan Asia Tenggara memiliki potensi untuk maju dan berkembang.

Berbagai potensi tersebut dapat dibuktikan dari tingkat kesejahteraan ekonomi negara-negara Asia Tenggara yang terus mengalami perkembangan yang cukup pesat, seperti Singapura dan Malaysia.

Salah satu upaya yang dilakukan Indonesia untuk menata kembali bangsa adalah dengan cara giat melakukan kerja sama dalam berbagai bidang dengan negara-negara khususnya yang ada di kawasan Asia Tenggara.

Jadi, kerja sama Asia Tenggara adalah keterlibatan negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk saling membantu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan negara negara yang ada di Asia Tenggara.

Gambar 3.1
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Sultan Hassanal Bolkiyah dari Brunei Darussalam.

Sumber: *www.presidenri.go.id*

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Indonesia selalu berperan aktif dalam berbagai kerja sama internasional. Salah satu bentuk kerja sama internasional di kawasan Asia Tenggara adalah *Association of South East Asian Nations* (ASEAN). ASEAN merupakan perkumpulan kerja sama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dasar perwujudan ASEAN ini adalah persamaan latar belakang budaya, persamaan senasib sebagai negara yang pernah mengalami penjajahan bangsa-bangsa Barat. Hal tersebut akhirnya menimbulkan perasaan setia kawan yang kuat di kalangan bangsa-bangsa yang ada di kawasan Asia Tenggara.

Pesan Budi Pekerti

Bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan negara lain, maka sudah sepantasnya kita menghormati negara lain

Latihan Mandiri

Saat ini ASEAN terdiri atas 10 negara. Pilih lima negara di antaranya untuk kamu bandingkan satu sama lain. Kerja sama dengan negara mana dan dalam bidang apa saja yang bermanfaat bagi Indonesia? Berikan penjelasan singkat, kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.

No	Negara	Bidang Kerja sama				
		Ekonomi	Sosial	Budaya	Teknik	Iptek
1.	....					
2.	....					
3.	....					
4.	....					
5.	....					

B Peran Serta Indonesia di Kawasan Asia Tenggara

1. Sejarah ASEAN

Sejarah pembentukan ASEAN didasarkan pada ekonomi, sosial, budaya, faktor internal (dari dalam) dan eksternal (dari luar). Faktor internal, yaitu bersatu untuk memperjuangkan kepentingan bersama dan sama-sama sebagai bekas jajahan negara Barat. Adapun faktor eksternal, yaitu adanya perang Vietnam (Indo-Cina) dan sikap Republik Rakyat Cina (RRC) yang ingin mendominasi Asia Tenggara.

Beberapa Menteri Luar Negeri Asia Tenggara merasa terpanggil untuk membentuk suatu badan kerja sama regional di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Menteri-menteri tersebut, yaitu sebagai berikut.

a. Adam Malik (Indonesia)
b. Rajaratnam (Singapura)
c. Narcisco Ramos (Filipina)
d. Tun Abdul Rajak (Malaysia)
e. Thanat Khoman (Thailand)

Mengenal Bahasa Inggris

Identitas	=	*Identity*
Kerja sama	=	*Cooperation*
Pertemuan	=	*Meeting*
Sejarah	=	*History*
Tujuan	=	*Purpose*

Gambar 3.2 Suasana penandatanganan Deklarasi Bangkok di Thailand pada 8 Agustus 1967.

Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*, 1977

Pada awal berdirinya, ASEAN terdiri atas lima negara anggota. Namun, sekarang ASEAN terdiri atas sepuluh negara anggota. Brunei bergabung menjadi negara

anggota ASEAN yang ke-6 pada 7 Januari 1984, kemudian Vietnam menjadi negara anggota ASEAN yang ke-7 pada 28 Juli 1995, selanjutnya Laos dan Myanmar bergabung menjadi negara anggota ASEAN yang ke-8 dan ke-9 pada 23 Juli 1997, dan yang terakhir Kamboja bergabung sebagai negara ASEAN yang ke-10 pada 16 Desember 1998.

2. Asas ASEAN

ASEAN sebagai organisasi kerja sama regional di Asia Tenggara menganut asas keanggotaan terbuka. Ini berarti bahwa ASEAN memberi kesempatan kerja sama kepada negara-negara lain yang berada di kawasan Asia Tenggara, seperti Timor Leste.

Sumber : *www.ukdw.ac.id*

Gambar 3.3

Lambang ASEAN berupa sepuluh tangkai padi yang melambangkan sepuluh negara anggota ASEAN.

3. Dasar ASEAN

Pembentukan ASEAN didasarkan pada hal-hal berikut.

a. Saling menghormati terhadap kemerdekaan, wilayah kedaulatan negara, dan identitas semua bangsa.
b. Mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasional yang bebas dari halangan luar.
c. Tidak saling turut campur urusan dalam negeri masing-masing.
d. Penyelesaian pertengkaran dan persengketaan secara damai.
e. Tidak mempergunakan ancaman/penggunaan kekuatan.
f. Menjalankan kerja sama secara aktif.

Sumber: *www.googleimages.com*

Gambar 3.4

Kerja sama antarsesama negara anggota ASEAN.

Ayo, Berlatih

Diskusikan dengan temanmu. Bagaimana jika kerja sama internasional tidak menguntungkan Indonesia? Kemudian, laporkan hasilnya kepada gurumu.

4. Tujuan ASEAN

Organisasi ASEAN didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967 dengan dasar-dasar pertimbangan sebagai berikut.

a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara.
b. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum.
c. Meningkatkan pertanian, industri, perdagangan, jasa dan meningkatkan taraf hidup.
d. Meningkatkan kerja sama yang aktif dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi.

Sumber: *www.pari.go.id*

Gambar 3.5

Meningkatkan kerja sama dalam bidang ilmu pengetahuan adalah salah satu contoh nyata dalam kerja sama ASEAN.

e. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian.
f. Memelihara kerja sama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional.

5. Struktur ASEAN

a. Sebelum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pertama di Bali 1976

Untuk memperlancar tugas dan tujuan ASEAN, dibentuklah struktur organisasi sebagai berikut.

1) ASEAN *Ministerial Meeting* (Sidang Tahunan para Menteri).
2) *Standing Committee* (Badan yang bersidang di antara dua sidang menteri luar negara ASEAN untuk menangani persoalan-persoalan yang memerlukan keputusan para menteri).
3) Komite-komite tetap dan komite-komite khusus.
4) Sekretariat nasional ASEAN pada setiap ibu kota negara-negara anggota ASEAN.

Ayo, Berlatih
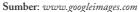
Diskusikan dengan temanmu. Siapakah Sekretaris Jenderal ASEAN saat ini? Kemudian, laporkan hasilnya kepada gurumu.

Gambar 3.6

Pertemuan tingkat tinggi ASEAN ke 40.

Sumber: *www.googleimages.com*

b. Setelah KTT Bali 1976

Dalam KTT kedua di Kuala Lumpur pada Agustus 1977, peserta KTT telah menyepakati dan mengesahkan struktur organisasi ASEAN sebagai berikut.

1) *Summit Meeting* (Pertemuan kepala pemerintahan) yang merupakan otoritas/kekuasaan tertinggi di dalam ASEAN.
2) ASEAN *Ministerial Meeting* (Sidang Tahunan para Menteri).
3) Sidang para menteri ekonomi, yang diselenggarakan setahun dua kali.

4) Sidang para menteri lainnya (non-ekonomi).
5) *Standing Committee.*
6) Komite-komite.

Dalam KTT ini disetujui pula bahwa tempat sekretariat ASEAN berada di Jakarta. Sekretariat ASEAN dipimpin oleh Sekretariat Jenderal atas dasar pengangkatan oleh para menlu ASEAN secara bergilir. Sekretariat Jenderal ASEAN mempunyai masa jabatan dua tahun. Dibantu oleh staf regional dan staf lokal.

Gambar 3.7

Terwujudnya perdamaian dunia sebagai salah satu tujuan dilaksanakannya kerja sama antarnegara.

Sumber : *www.usc.edu.jakarta.com*

Tujuan yang ingin dicapai dari peningkatan kerja sama tersebut, yaitu semakin meningkatnya peranan Indonesia dalam hubungan internasional dan dalam menciptakan perdamaian dunia, serta pulihnya citra Indonesia dan kepercayaan masyarakat internasional khususnya kawasan Asia Tenggara. Indonesia perlu membangun suatu arah kebijakan politik luar negeri dan peningkatan kerja sama Asia Tenggara adalah sebagai berikut.

1) Meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional.
2) Melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan penyatuan regional khususnya di ASEAN.
3) Menegaskan pentingnya memelihara kebersamaan melalui kerja sama internasional bilateral (kerja sama dua negara) dan multilateral (kerja sama banyak negara) maupun kerja sama regional lainnya, saling pengertian dan perdamaian dalam politik dan hubungan internasional.

Pesan Budi Pekerti
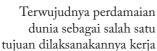
Dengan terjalinnya kerja sama antarnegara, diharapkan setiap negara dapat saling membantu dalam memenuhi kebutuhan negaranya masing-masing.

Atas dasar prinsip itulah, ASEAN berkembang pesat sampai sekarang dengan bertambahnya anggota menjadi 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja.

ASEAN diharapkan terus tumbuh dan berkembang menjadi saran dalam menyejahterakan seluruh negara yang menjadi anggotanya. Harapan ini sesuai dengan prinsip dasar ASEAN, yaitu sebagai berikut.

1) Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, dan identitas nasional semua negara.
2) Hak bagi setiap negara untuk terbebas dari campur tangan pihak luar.
3) Tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.
4) Penyelesaian perbedaan dan persengketaan dengan cara damai.
5) Menolak penggunaan ancaman dan paksaan.
6) Kerja sama yang efektif dengan sesama anggota.

Sumber : *www.dfat.go.id*

Gambar 3.8

Pertemuan para pemimpin ASEAN dari negara mitra dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama antarnegara ASEAN dan negara lainnya.

Figur

Sumber : *www.arfasia.go.id*

Surin Pitsuwan ialah Sekretaris Jenderal ASEAN ke-12 yang berasal dari Thailand.

Sebelum ASEAN terbentuk, sudah ada beberapa organisasi Asia Tenggara, seperti berikut ini.

1) ASA (*Association of South East Asia*) dengan anggota Malaysia, Filipina, Muangthai yang didirikan di Bangkok pada 31 Juli 1961.
2) ASPAC (*Asia Pacific Coorporation*), yaitu kerja sama Asia Pasifik yang beranggotakan Filipina, Malaysia, Vietnam, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Australia, dan Selandia Baru.

Diskusikan dengan temanmu. Apa saja peranan ASEAN bagi kemajuan bangsa Indonesia? Kemudian, laporkan hasilnya kepada gurumu.

3) SEATO (*South East Asia Treaty Organization*), yaitu organisasi pertahanan Asia Tenggara atau persekutuan militer negara Asia Tenggara, terdiri atas Thailand, dan Filipina yang didukung oleh Malaysia dan Vietnam.
4) *Maphilindo*, yaitu organisasi berdasarkan konsepsi negara-negara serumpun. Anggotanya, di antaranya Malaysia, Filipina, dan Indonesia.

Dasar ideal kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah sejiwa dengan Pancasila. Kerja sama yang dimaksud adalah membangun komunikasi antarnegara dengan membentuk suatu perjanjian yang saling menguntungkan antara negara yang mengadakan perjanjian.

Kerja sama yang dipakai oleh bangsa Indonesia adalah semangat kebersamaan dan saling menguntungkan. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia berusaha melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam melakukan kerja sama internasional.

Gambar 3.9

South East Asia Treaty Organization (SEATO), merupakan organisasi pertahanan Asia Tenggara.

Sumber : *www.seatocontent.answers.com*

Berikut adalah beberapa contoh hasil kerja sama antarnegara anggota ASEAN.

1) Pabrik pupuk urea di Malaysia.
2) Pabrik abu soda di Thailand.
3) Pabrik tembaga di Filipina.
4) Pabrik pupuk urea di Aceh.
5) Pabrik diesel dan pabrik vaksin di Singapura.

Di samping itu, ada pula beberapa contoh kerja sama lain antara Indonesia dengan beberapa negara anggota ASEAN, yaitu sebagai berikut.

1) Dalam bidang hukum dan keamanan, diadakan perjanjian ekstradisi (penyerahan orang yang dianggap melakukan kriminalitas oleh suatu negara kepada negara lain).
2) Dalam bidang olahraga, diadakan pertandingan olahraga Asia Tenggara, yaitu SEA Games setiap dua tahun sekali dengan negara-negara Asia Tenggara sebagai penyelenggaranya secara bergantian.

Sumber : *www.seagamesathletic.com*

Gambar 3.10
SEA Games merupakan wujud peningkatan hubungan antarnegara di kawasan Asia Tenggara dalam bidang olahraga.

3) Dalam bidang kesehatan, bekerja sama untuk mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba dan berbagai wabah penyakit berbahaya misalnya flu burung.
4) Dalam bidang pariwisata, diadakan kunjungan antarnegara untuk memperkenalkan dan memajukan potensi pariwisata yang ada di setiap negara.
5) Dalam bidang kesenian, diadakan pagelaran seni budaya antarnegara untuk saling mengenal atau bahkan mempelajari seni budaya yang dimiliki oleh negara lain.
6) Dalam bidang pendidikan, diadakan pertukaran pelajar dan mahasiswa antarnegara anggota ASEAN untuk memajukan kualitas pendidikan.

Wawasan

Kerja sama yang dilakukan antarnegara anggota ASEAN mampu menunjang kemajuan dan pemenuhan atas kebutuhan setiap negara yang menjalin kerja sama.

Latihan Bersama

Buatlah kelompok belajar, kemudian carilah informasi dari berbagai sumber tentang kerja sama yang pernah dilakukan Indonesia di berbagai bidang di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, berikan penjelasan mengenai kerja sama tersebut, kemudian tulis dalam buku tugasmu dan laporkan hasilnya kepada gurumu.

No	Negara	Bidang	Keterangan
1.	____________	____________ ____________ ____________	____________ ____________ ____________ ____________ ____________
2.	____________	____________ ____________ ____________	____________ ____________ ____________ ____________ ____________
3.	____________	____________ ____________ ____________	____________ ____________ ____________ ____________ ____________
4.	____________	____________ ____________ ____________	____________ ____________ ____________ ____________ ____________
5.	____________	____________ ____________ ____________	____________ ____________ ____________ ____________ ____________

Ringkasan Bab 3

- Asia Tenggara adalah kawasan yang ada di Benua Asia yang memiliki tempat yang strategis karena berada tepat di jalur perdagangan internasional.
- Dasar perwujudan ASEAN ialah persamaan nasib sebagai negara yang pernah mengalami penjajahan bangsa-bangsa Barat.
- Negara-negara di Asia Tenggara meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Timor Leste.
- ASEAN didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967 dengan kantor sekretariat di Jakarta.
- ASEAN beranggotakan 10 negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja.
- Prinsip dasar kerja sama ASEAN adalah kerja sama yang saling menguntungkan antarsesama negara anggota.
- Sifat keanggotaan organisasi ASEAN adalah bersifat keanggotaan terbuka.

Mengukur Kemampuan

Isilah pertanyaan berikut dengan jawaban setuju atau tidak setuju pada buku tugasmu.

No.	Pertanyaan	Setuju	Tidak Setuju
1.	Bekerja sama untuk menjatuhkan orang lain.		
2.	Meningkatkan kesejahteraan bersama melalui kerja sama.		
3.	Mencegah siapa pun melakukan kerja sama yang merugikan orang lain.		
4.	Meningkatkan kerja sama dalam kejahatan.		
5.	Bekerja sama dengan orang lain tanpa membeda-bedakan.		

Evaluasi Bab 3

Kerjakan pada buku tugasmu.

A. Pilih jawaban yang paling tepat.

1. Melaksanakan ketertiban dunia dan negara merupakan tanggung jawab ....
   a. bangsa
   b. warga negara
   c. pemerintah
   d. DPR
2. Keberhasilan negara Indonesia sebagai salah satu pemrakarsa penyelenggara Konferensi Asia-Afrika, membuktikan bahwa politik luar negeri Indonesia ....
   a. diacuhkan oleh dunia
   b. mengarah pada satu blok
   c. dilecehkan oleh dunia
   d. mendapat perhatian dunia
3. Rajaratnam merupakan salah satu pemrakarsa terbentuknya ASEAN yang berasal dari negara ....
   a. Indonesia
   b. Malaysia
   c. Thailand
   d. Singapura
4.

   Sumber : *www.meanindia.com*

   ASEAN merupakan perkumpulan negara-negara ....
   a. Asia Tenggara
   b. Asia Timur
   c. Asia Selatan
   d. Asia Barat daya
5. Faktor eksternal pembentukan ASEAN karena terjadi perang di negara ....
   a. Cina
   b. Thailand
   c. Vietnam
   d. Malaysia
6.

   Sumber : *www.meanindia.com*

   Berikut ini adalah salah satu asas yang dianut oleh ASEAN ....
   a. asas keanggotaan tertutup
   b. asas keanggotaan terbuka
   c. asas keanggotaan tetap
   d. asas keanggotaan tidak tetap
7. Sekretariat ASEAN yang dikepalai seorang sekretaris jenderal, berkeduduk-an di ....
   a. Manila
   b. Malaysia
   c. Singapura
   d. Jakarta
8. *South East Asian Treaty Organization* (SEATO) merupakan organisasi ....
   a. pertahanan
   b. makanan
   c. pendidikan
   d. transportasi

9. Organisasi ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 di Kota ....
   a. Jakarta
   b. Kuala Lumpur
   c. Bangkok
   d. Manila
10. Organisasi berdasarkan konsepsi negara-negara serumpun dikenal dengan ....
   a. *Maphilindo*
   b. ASA
   c. ASPAC
   d. SEATO
11. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional merupakan salah satu isi dari ....
   a. struktur ASEAN
   b. keanggotaan ASEAN
   c. dasar ASEAN
   d. tujuan ASEAN
12. Sidang para menteri ekonomi berlangsung dalam ....
   a. setahun dua kali
   b. setahun tiga kali
   c. setahun empat kali
   d. setahun lima kali
13. Organisasi ASEAN dipimpin oleh seorang ....
   a. presiden
   b. menteri
   c. sekretariat Jenderal
   d. sekretariat Nasional
14. ASEAN didirikan di Bangkok tanggal 8 Agustus pada tahun...
   a. 1955
   b. 1970
   c. 1965
   d. 1967
15. Deklarasi ASEAN diprakarsai oleh 5 negara kecuali ....
   a. Indonesia
   b. Singapura
   c. Pakistan
   d. Filipina
16. Organisasi Asia Tenggara yang didirikan pada 31 Juli 1961 adalah ....
   a. ASA
   b. ASPAC
   c. SEATO
   d. *Maphilindo*
17. Organisasi Asia Tenggara yang bergerak di bidang militer adalah ....
   a. ASA
   b. ASPAC
   c. SEATO
   d. *Maphilindo*
18. Perwakilan Indonesia yang membentuk kerja sama regional di kawasan Asia Tenggara ialah ....
   a. Adam Malik
   b. Rajaratnam
   c. Adul Rajak
   d. Khotman
19. Perwakilan Malaysia yang membentuk kerja sama regional di kawasan Asia Tenggara ....
   a. Adam Malik
   b. Rajaratnam
   c. Adul Rajak
   d. Khotman
20. Organisasi ASEAN didirikan di Bangkok pada ....
   a. 18 Agustus 1945
   b. 11 November 1947
   c. 8 Agustus 1961
   d. 8 Agustus 1967

B. Isilah titik-titik berikut dengan benar.

1. ASEAN singkatan dari ....
2. ASEAN berdiri pada tahun ... di ....
3. ASEAN anggotanya dari kawasan ....
4. Narciso Ramos merupakan perwakilan dari negara ....
5. Saling menghormati terhadap kemerdekaan merupakan prinsip dari ....
6. Keanggotan terbuka merupakan ... ASEAN
7. KTT pertama ASEAN diselenggarakan di ....
8. KTT kedua diselenggarakaan di ....
9. Tahun berapa KTT pertama dan kedua diselenggarakan ....
10. *Standing Committee* adalah ....

C. Jawablah pertanyaan berikut.

1. Mengapa perdamaian sangat penting bagi dunia?
2. Kemukakan sejarah berdirinya ASEAN.
3. Apa yang menjadi asas ASEAN?
4. Apa yang melatarbelakangi pembentukan ASEAN?
5. Tuliskan tujuan dibentuknya ASEAN.
6. Uraikan hasil dari KTT ASEAN pertama.
7. Tuliskan hasil dari KTT ASEAN kedua.
8. Manfaat apa yang diperoleh dari keikutsertaan Indonesia dalam ASEAN?
9. Tuliskan beberapa organisasi yang ada di Asia Tenggara sebelum ASEAN terbentuk.
10. Kegiatan pokok apa yang dilakukan oleh ASEAN?

Ayo, Kerjakan

Datangi organisasi karang taruna yang ada di sekitarmu. Tanyakan bagaimana proses terjadinya kerja sama dalam organisasi tersebut. Cari tahu beberapa alasan yang mendorong para pemuda karang taruna melakukan kerja sama dan temukan pula tujuannya. Tulis jawabanmu dalam buku tugas mandiri.

Bab 4

Sumber: *www.presidenri.go.id*

Politik Luar Negeri Indonesia dalam Era Globalisasi

Manfaat yang Kamu Peroleh

Kamu dapat memahami peranan politik luar negeri Indonesia dalam era globalisasi.

Kata Penting

Politik luar negeri, Globalisasi, Bebas-Aktif.

A. Politik Luar Negeri dan Kebijakan Luar Negeri

B. Tujuan dalam Hubungan Luar Negeri Indonesia

C. Peranan Indonesia dalam Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar yang menjunjung tinggi kedaulatan bangsa. Indonesia juga menghormati negara lain sebagai negara yang berdaulat. Dalam melaksanakan hubungan dengan luar negeri atau dengan bangsa lain Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif. Tahukah kamu, apakah politik luar negeri? Bagaimana sebenarnya politik luar negeri bebas aktif? Sebelum kamu mempelajari ini lebih dalam. Perhatikanlah peta konsep berikut.

Peta Konsep

Politik Luar Negeri Indonesia
meliputi
Sifat Politik Luar Negeri
terdiri atas
Bebas
Aktif
Bentuk Partisipasi Politik Luar Negeri
meliputi
Pengiriman Misi Perdamaian
Kerja Sama Ekonomi
Pengiriman Duta Besar dan Konsulat

A Politik Luar Negeri dan Kebijakan Luar Negeri

Sebelum menerangkan lebih jauh mari kita telusuri arti dari politik luar negeri itu sendiri. Politik luar negeri merupakan ciri khas yang membedakan antara negara Indonesia dengan negara lain di dunia. Politik luar negeri adalah pemikiran besar yang dianut sebuah negara tentang cara pandang negara tersebut terhadap dunia.

Politik luar negeri adalah wawasan internasional. Oleh karena itu, politik luar negeri cenderung bersifat tetap, politik luar negeri juga dapat diartikan sebagai pola perilaku, dan kebijakan suatu negara berhubungan dengan negara lain ataupun dunia internasional.

Sumber: *www.presidenri.go.id*

Gambar 4.1
Politik luar negeri yang dijalankan oleh Indonesia harus sesuai dengan amanat UUD 1945.
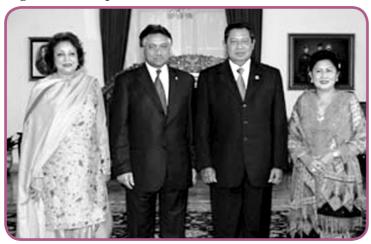
Bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip-prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Politik luar negeri diabdikan bagi kepentingan nasional terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sementara kebijakan luar negeri adalah strategi atau cara yang diterapkan bergantung pada pendekatan, gaya, dan keinginan pemerintahan terpilih. Pemerintah akan

mempertimbangkan berbagai keterbatasan (dana dan sumber daya) yang dimiliki. Dengan demikian kebijakan luar negeri akan bergantung pada politik luar negeri.

Bebas dan aktif dalam politik luar negeri dapat diartikan bebas dalam memilih apapun dan aktif dalam berpartisipasi dalam perdamaian dunia.

Gambar 4.2

Kebijakan luar negeri Indonesia akan bergantung pada politik luar negeri yang dijalankan oleh Indonesia.

Sumber : *www.presidenri.go.id*

1. Dasar Pertimbangan

Pada tahun-tahun pertama berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan Indonesia dihadapkan pada kenyataan sejarah, yaitu munculnya dua kekuatan besar di dunia. Satu pihak Blok Barat (Amerika Serikat) dan di pihak lain Blok Timur (Uni Soviet).

Kenyataan demikian sangat berpengaruh terhadap usaha-usaha bangsa Indonesia untuk menjalin hubungan atau kerja sama demi kelangsungan hidup negara. Pengaruh lain adalah adanya ancaman dari Belanda yang ingin kembali menjajah bangsa Indonesia. Kondisi itulah yang kemudian menguatkan tekad bangsa Indonesia untuk merumuskan politik luar negerinya.

Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil adalah pendirian untuk tidak menjadi objek dalam pertarungan politik internasional. Indonesia harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan nasib sendiri dan memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya.

Ayo, Berlatih

Diskusikan dengan temanmu. Mengapa Indonesia tidak memilih salah satu Blok? Laporkan hasilnya kepada gurumu.

Perjuangan harus dilakukan atas dasar kepercayaan terhadap diri sendiri dan kemauan untuk berjuang dengan kemampuan sendiri melalui usaha menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain di dunia. Keterangan inilah yang kemudian menjadi dasar pertimbangan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Sudah seharusnya semua warga tetap mempertahankan politik luar negeri bebas aktif agar tidak hanyut dalam arus pertentangan bebas.

Sumber : *www.dpr.go.id*

Gambar 4.3
Kebebasan berjuang untuk menentukan nasib bangsa dan negara menuju arah yang lebih baik.

2. Dasar-Dasar Politik Luar Negeri Indonesia

Pada dasarnya politik luar negeri Republik Indonesia tidak mengalami perubahan. Politik luar negeri bebas aktif tetap berdasarkan pada Pembukaan UUD 1945 dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) 2004–2009. RPJM di antaranya sebagai berikut.

a. Menegaskan arah politik Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional.
b. Menitikberatkan pada solidaritas antarnegara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa.
c. Menolak penjajahan dalam segala bentuk.
d. Meningkatkan kemandirian bangsa dan kerja sama internasional bagi kesejahteraan rakyat.

Mengenal Bahasa Inggris

Hubungan = *Relation*
Kesatuan = *Unity*
Luar Negeri = *Foreign*
Politik = *Politic*

Di samping itu, dengan telah disahkannya Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri tanggal 14 September 1999 maka pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan politik luar negeri RI selalu merujuk pada ketentuan-ketentuan termaksud dalam UU tersebut.

Gambar 4.4
Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus melalui pertimbangan DPR.

Sumber : *www.dpr.go.id*

Hal yang menjadi landasan bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut.

a. Landasan ideal
   Pancasila, sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
b. Landasan Konstitusional/UUD 1945
   Pembukaan, alinea pertama "... kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan..." dan pembukaan alinea keempat "...ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...". Batang tubuh UUD 1945, pasal 11 ayat 1 "Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain".
c. Landasan Operasional
   Peraturan perundang-undangan, UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Wawasan

Politik luar negeri Indonesia memiliki landasan yang kuat karena berakar pada falsafah Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini merupakan pencerminan dari cita-cita bangsa Indonesia.

Latihan Mandiri

Kerjakan pada buku tugasmu.

Buatlah kliping berisi berita dari berbagai media massa yang memuat tema kebijakan dan politik luar negeri yang pernah dilakukan oleh Indonesia, kemudian pahami isinya dan berikan pendapat kalian mengenai berita tersebut. Setelah itu, bacakan salah satu kliping yang telah kalian buat di depan kelas, agar teman-teman kalian dapat ikut memberikan penilaian terhadap isi kliping tersebut.

No	Judul dan Uraian Kliping	Pendapat
1.		
2.		
3.		

B Tujuan dalam Hubungan Luar Negeri Indonesia

Kebjiakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif secara umum memiliki beberapa kebijakan. Adapun kebijakan politik yang diambil, di antaranya yaitu:

1. pemulihan citra Indonesia di mata masyarakat internasional;
2. pemulihan ekonomi nasional dan kesejahteraan umum;

Gambar 4.5

Kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia adalah tujuan utama kerja sama internasional.

Sumber : *Tempo*, 29 Juli 2007

3. pemeliharaan keutuhan wilayah nasional, persatuan bangsa, serta stabilitas nasional, serta mencegah terjadinya perpecahan bangsa;
4. peningkatan hubungan bilateral dengan memprioritaskan negara-negara yang dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi, perdagangan, penanaman modal dan pariwisata;
5. memajukan kerja sama internasional dalam rangka pemeliharaan perdamaian dunia;
6. pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Wawasan

Dengan adanya globalisasi maka hubungan antarnegara di dunia seolah menjadi tidak berbatas. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya hubungan luar negeri antarnegara menjadi semakin terbuka.

Sumber : *www.google.images.com*

Gambar 4.6

Tumbuh pesatnya perakitan mobil di Indonesia sebagai dampak dari adanya kerja sama internasional khususnya dengan Jepang.

Jika memperhatikan kenyataan tersebut maka upaya Indonesia untuk mencapai berbagai kepentingan nasionalnya di tingkat internasional perlu ditopang melalui pengerahan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan diplomasi atau kerja sama antarnegara. Hal tersebut harus diantisipasi oleh Indonesia melalui kebijakan dan strategi politik luar negeri yang tepat sehingga Indonesia dapat menarik manfaat maksimal dalam hubungan internasional tersebut.

Adapun yang menjadi tujuan diselenggarakannya politik luar negeri bebas aktif Indonesia dapat dilihat dari hal berikut.

1. Dalam lingkup nasional, politik luar negeri Indonesia tetap ditujukan untuk menjaga keutuhan wilayah nasional, persatuan bangsa serta stabilitas nasional dalam menghadapi permasalahan di dalam negeri. Politik luar negeri Indonesia juga perlu terus diabdikan untuk menunjang kesejahteraan umum dan pemulihan ekonomi nasional.
2. Dalam lingkup hubungan antardua negara, Indonesia berupaya untuk memantapkan dan meningkatkan hubungan bilateral dengan negara-negara sahabat dengan terus mempelajari kemungkinan pembinaan hubungan bilateral dengan negara-negara yang dinilai

Pesan Budi Pekerti

Prinsip politik luar negeri "bebas aktif" harus mampu mendorong Indonesia untuk berupaya berperan secara aktif dalam setiap kegiatan internasional dengan disertai semangat kekeluargaan.

Ayo, Berlatih

Diskusikan dengan temanmu. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Indonesia selama menjalankan politik luar negeri bebas aktif? Kemudian, laporkan hasilnya kepada gurumu.

berpotensi membantu upaya pencapaian kepentingan nasional Indonesia. Indonesia juga akan terus mengupayakan kehidupan politik bertetangga baik dengan negara-negara yang secara geografis berbatasan langsung, namun tentunya dengan tetap didasarkan pada prinsip kesejahteraan dan saling menghormati.

3. Dalam lingkup wilayah, Indonesia sangat mendukung pemulihan perekonomian Asia Tenggara dan akan berpartisipasi aktif dalam berbagai langkah ASEAN dan tetap memainkan kepemimpinan di ASEAN serta menjaga kekompakan sesama ASEAN. Dalam 40 tahun terakhir, Indonesia telah memainkan peranan penting dalam membangun ASEAN dan membina tatanan kawasan.

Gambar 4.7 Pembangunan Indonesia yang berkelanjutan menjadikan Indonesia terus tumbuh dan berkembang.

Sumber : *www.google.images.com*

4. Dalam lingkup dunia, Indonesia tetap menaruh harapan besar pada PBB dan tetap meyakini keabsahan institusi ini. PBB adalah satu-satunya lembaga internasional yang paling mampu dalam mengambil keputusan-keputusan penting yang bersifat mendunia, dengan catatan terus dilaksanakannya program-program PBB hingga tercapainya suatu keadaan yang benar-benar dapat menampung harapan seluruh negara anggotanya.

Latihan Bersama

Kerjakan pada buku tugasmu.
Buatlah kelompok belajar, cari dari berbagai sumber tentang nama negara dan pemimpin yang berada kawasan Asia Tenggara. Kemudian, berikan penjelasan mengenai hubungan negara tersebut dengan negara Indonesia. Laporkan hasilnya kepada gurumu.

No	Negara dan Pemimpin	Keterangan
1.	Negara: ____________ Pemimpin: ____________	____________ ____________ ____________ ____________ ____________
2.	Negara: ____________ Pemimpin: ____________	____________ ____________ ____________ ____________ ____________
3.	Negara: ____________ Pemimpin: ____________	____________ ____________ ____________ ____________ ____________
4.	Negara: ____________ Pemimpin: ____________	____________ ____________ ____________ ____________ ____________
5.	Negara: ____________ Pemimpin: ____________	____________ ____________ ____________ ____________ ____________

C Peranan Indonesia dalam Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Ayo, Berlatih

Diskusikan dengan temanmu. Negara mana saja yang pernah bekerja sama dengan Indonesia? Kemudian, laporkan hasilnya kepada gurumu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai presiden terpilih periode 2004–2009. Pada awal kepemimpinannya, presiden dihadapkan pada sejumlah tantangan yang meliputi masalah korupsi, penegakan hukum, dan pertumbuhan ekonomi. Tidak kalah menariknya, tantangan politik luar negeri ke depan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah baru yang terpilih. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda pada akhir Mei 2004 bahwa presiden harus menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) *Asia Europe Meeting* (ASEM) Oktober 2004, KTT ASEAN dan KTT APEC November 2004, dan KTT Asia Afrika April 2005.

Gambar 4.8

Suasana Konferensi Asia Afrika ke-1 di Gedung Merdeka Bandung pada 24 April 1955.

Sumber : *Gatra: 50 Tahun Konferensi Asia Afrika* , 23 April 2005

Pemerintah baru yang terpilih perlu melakukan beberapa penyesuaian terhadap berbagai perubahan yang terjadi. Hal ini berarti bahwa pemerintah perlu berperan aktif dalam mengusahakan agar perubahan-perubahan tersebut mengarah pada terwujudnya dunia yang lebih damai, adil, dan sejahtera. Diharapkan berbagai penyesuaian tersebut mengarah pada kondisi yang dapat menguntungkan bagi pencapaian sasaran-sasaran kepentingan nasional.

Negara Indonesia harus berpartisipasi aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. Untuk itu, Indonesia perlu menentukan politik luar negeri yang selaras dengan tujuan tersebut. Salah satunya dengan mengirimkan tentara penjaga perdamaian ke negara yang sedang mengalami konflik.

Sumber : *www.mediaindo.co.id*

Gambar 4.9
Menjaga keamanan dan perdamaian dunia merupakan tugas dari setiap negara.

Dalam rangka menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera, negara Indonesia harus tetap melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif.

1. Bebas, artinya Indonesia bebas menentukan sikap dan pandangan terhadap masalah-masalah internasional dan terlepas dari ikatan kekuatan-kekuatan raksasa dunia yang secara pandangan atau pemikiran bertentangan.
2. Aktif, artinya Indonesia dalam politik luar negeri senantiasa aktif memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia. Aktif memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan, aktif memperjuangkan ketertiban dunia, dan aktif ikut serta menciptakan keadilan sosial dunia.

Perwujudan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, dapat dilihat pada contoh berikut.

1. Penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika pada 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia-Afrika yang kemudian melahirkan Deklarasi Bandung.

Pesan Budi Pekerti

Negara Indonesia harus turut berperan secara aktif dalam pergaulan internasional sebagai wujud kepedulian Indonesia dalam menciptakan keharmonisan dan meningkatkan perdamaian dunia.

Ayo, Berlatih

Diskusikan dengan temanmu. Kendala apakah yang dihadapi dalam menciptakan perdamaian dunia? Kemudian, laporkan hasilnya kepada gurumu.

2. Keaktifan Indonesia sebagai salah satu negara pendiri Gerakan Non-Blok pada 1961 yang berusaha membantu dunia internasional untuk meredakan ketegangan Perang Dingin antara blok Barat dan blok Timur.
3. Indonesia juga aktif di dalam merintis dan mengembangkan organisasi di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).
4. Ikut aktif membantu penyelesaian konflik Kamboja, perang saudara di Bosnia, pertikaian dan konflik antara pemerintah Filipina dan bangsa Moro, serta turut berpartisipasi dalam meredakan konflik di Lebanon.

Sumber : *www.ukdw.ac.id*

Gambar 4.10

Pasukan penjaga perdamaian PBB asal Indonesia yang tergabung dalam pasukan Garuda.

Keikutsertaan Indonesia dalam misi perdamaian internasional telah menempatkan posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki peranan yang strategis dalam dunia internasional. Kondisi ini semakin dipertegas lagi dengan masuknya Indonesia dalam keanggotaan tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang merupakan lembaga internasional di bawah naungan PBB yang bergerak dalam masalah perdamaian internasional.

Peranan penting Indonesia saat ini harus dapat dilanjutkan oleh seluruh generasi penerus bangsa, oleh karena itu masa depan dan kemajuan bangsa terletak di pundak generasi penerusnya.

Latihan Bersama

Kerjakan pada buku tugasmu.

Carilah dari berbagai sumber tentang peranan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Tuliskan nama-nama negara yang pernah memperoleh bantuan dari Indonesia. Berikan penjelasan mengenai contoh bantuan yang diberikan oleh Indonesia. Laporkan hasilnya kepada gurumu.

No	Negara	Peran Indonesia
1.	______________________ ______________________	______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________
2.	______________________ ______________________	______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________
3.	______________________ ______________________	______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________
4.	______________________ ______________________	______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________
5.	______________________ ______________________	______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________

Ringkasan Bab 4

- Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan politik luar negeri yang sesuai dengan pembukaan UUD 1945.
- Bebas, artinya bangsa Indonesia memiliki kebebasan untuk berhubungan dengan negara manapun, tanpa terikat pada Blok manapun.
- Aktif, artinya bangsa Indonesia selalu berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.
- Landasan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut.
  a. Landasan Ideal: Pancasila
  b. Landasan Konstitusional: UUD 1945
  c. Landasan Operasional: Peraturan perundang-undangan
- Kebijakan politik dan hubungan luar negeri, yaitu:
  a. pemulihan citra Indonesia di mata masyarakat internasional;
  b. pemulihan ekonomi nasional dan kesejahteraan umum;
  c. pemeliharaan keutuhan wilayah nasional, persatuan bangsa, serta stabilitas nasional, serta mencegah terjadinya disintegrasi bangsa;
  e. memajukan kerja sama internasional dalam rangka pemeliharaan perdamaian dunia;
  f. pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun spiritual.

Mengukur Kemampuan

Tandai salah satu jawaban yang menurutmu paling tepat dengan tanda (✓) pada salah satu pilihan berikut.

No.	Kebijakan luar negeri	Penting	Tidak Penting	Alasan
1.	Pengiriman pasukan perdamaian dunia.			
2.	Pengiriman duta besar dan konsulat.			
3.	Mengadakan kunjungan ke setiap negara.			
4.	Mendukung pengembangan nuklir dunia.			
5.	Mengadakan kerja sama antarnegara.			

Evaluasi Bab 4

Kerjakan pada buku tugasmu.

A. Pilih jawaban yang paling tepat.

1. Dalam melaksanakan hubungan dengan luar negeri Indonesia menggunakan program yang lebih dikenal sebagai ....
   a. politik bebas bebas
   b. politik aktif aktif
   c. poltik bebas aktif
   d. politik Indonesia
2.

   Sumber : *www.kabinet.go.id*

   Gambar di atas adalah logo organisasi internasional , yaitu ....
   a. ASEAN
   b. APEC
   c. ASEAN
   d. PBB
3. Dalam melaksanakan hubungan dengan luar negeri Indonesia selalu menjalin kerja sama yang melahirkan suatu ikatan yaitu ....
   a. perjanjian
   b. musyawarah
   c. kerja sama
   d. politik
4. Identitas yang membedakan negara satu dengan yang lainnya dilihat dari ....
   a. budaya
   b. politik luar negeri
   c. kerja sama
   d. keaktifan
5. Pemikiran besar yang dianut oleh suatu negara tentang cara pandang negara terhadap dunia merupakan pengertian dari ....
   a. kebijakan luar negeri
   b. Departemen Luar Negeri
   c. politik luar negeri
   d. kerja sama luar negeri
6.

   Sumber : *www.wordpress.com*

   Landasan ideal politik luar negeri Indonesia ialah ....
   a. Pancasila
   b. UUD 1945
   c. GBHN
   d. TAP MPR

7. Politik luar negeri adalah ....
   a. wawasan internasional
   b. wawasan rakyat
   c. wawasan daerah
   d. wawasan nasional
8. Pada tahun pertama berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat dua kekuatan besar dunia yakni negara ....
   a. Cina dan Uni Soviet
   b. Indonesia dan Malaysia
   c. Amerika Serikat dan Jepang
   d. Amerika Serikat dan Uni Soviet
9.

   Sumber : *www.setwapres.go.id*

   Gambar berikut ialah menteri luar negeri yang mewakili Indonesia dalam pembentukan ASEAN ....
   a. Hasan Wirajuda
   b. Adam Malik
   c. Ali Alatas
   d. Mochtar Kusumaatmadja
10. Salah satu segi yang senantiasa harus diperhatikan untuk pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif diabadikan untuk ....
   a. kepentingan nasional
   b. kepentingan regional
   c. kepentingan internasional
   d. perdamaian bangsa
11. Dalam mewujudkan tujuan politik luar negeri bebas dan aktif, ada beberapa sikap yang perlu didukung, kecuali ....
   a. memantapkan peranan Indonesia dalam ASEAN
   b. menyokong uji coba nuklir di bawah dasar laut
   c. mendukung netralisasi ASEAN dan Samudra Indonesia
   d. memperkokoh kerja sama negara-negara Non-Blok
12. Berikut ini merupakan salah satu kebijakan politik dan hubungan luar negeri ....
   a. peningkatan hubungan bilateral
   b. peningkatan disintegrasi
   c. meningkatkan keyakinan
   d. peningkatan pembangunan spiritual
13. Pemulihan perekonomian Asia Tenggara merupakan salah satu tujuan politik luar negeri Indonesia dalam konteks ....
   a. nasional
   b. bilateral
   c. regional
   d. global
14. Meningkatkan hubungan bilateral dengan negara-negara sahabat merupakan tujuan politik luar negeri Indonesia dalam konteks ....
   a. nasional
   b. bilateral
   c. regional
   d. global
15. Jika terjadi konflik di organisasi ASEAN, sebaiknya diselesaikan dengan cara ....
   a. kekerasan
   b. hukuman
   c. damai
   d. peperangan

16.

Sumber : *www.gedungmerdeka.go.id*

Pada 24 April 1955, gedung pertemuan tersebut pernah dipergunakan sebagai tempat penyelenggaraan ....
   a. KTT Asia Afrika
   b. KTT APEC
   c. KTT ASEM
   d. KTT ASEAN
17. Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia ialah ....
   a. KEPPRES
   b. peraturan Menlu
   c. Pancasila
   d. UUD 1945
18. Pedoman operasional dalam melaksanakan kegiatan politik luar negeri yang bebas dan aktif adalah ....
   a. Pembukaan UUD 1945
   b. Penjelasan UUD 1945
   c. TAP MPRS No. IX/ MPRS/1966
   d. TAP MPRS No. XII/ MPRS/ 1966
19. Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan politik luar negeri sesuai dengan UU yakni ....
   a. UU No. 35 Tahun 1999
   b. UU No. 36 Tahun 1999
   c. UU No. 37 Tahun 1999
   d. UU No. 38 Tahun 1999
20. Dalam upaya menjalin hubungan atau kerja sama dengan negara lain Indonesia melakukannya dengan ....
   a. kebijakan dan strategi politik luar negeri
   b. strategi dan kemampuan politik luar negeri
   c. kebijakan pemerintah
   d. kerja sama luar negeri

B. Isilah titik-titik berikut dengan benar.

1. Dalam menjalankan hubungan dengan luar negeri, Indonesia melakukannya dengan politik ....
2. Kebijakan luar negeri ialah ....
3. Politik luar negeri Indonesia dibangun pada konteks ....
4. Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia ialah ....
5. Politik luar negeri ialah ....
6. Dasar politik luar negeri Indonesia berdasarkan ... dan ....
7. Pemulihan citra Indonesia di mata masyarakat internasional merupakan salah satu ... dalam hubungan luar negeri Indonesia.
8. Organisasi yang menjadi tujuan Indonesia dalam konteks global ialah ....
9. KTT ASEM 2004 dihadiri oleh ....
10. Politik luar negeri yang bebas dan aktif ialah ....

C. Jawablah pertanyaan berikut.

1. Apa yang melatarbelakangi lahirnya politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif?
2. Apa yang menjadi tujuan dari politik luar negeri yang bebas dan aktif?
3. Uraikan oleh kamu mengenai arti bebas dan aktif dalam politik luar negeri Indonesia.
4. Apa yang dimaksud dengan politik luar negeri bebas aktif?
5. Apa yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia?
6. Sebutkan tujuan politik luar negeri dalam konteks nasional, bilateral, regional, dan global.
7. Sebutkan perwujudan politik luar negeri bebas aktif Indonesia.
8. Apa yang dimaksud dengan kebijakan luar negeri?
9. Sebutkan contoh lain perwujudan atau pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia.
10. Menurut kamu pengaruh apa yang dihasilkan dari politik luar negeri Indonesia terhadap pembangunan nasional?

Ayo, Kerjakan

Cari informasi dari berbagai sumber mengenai kerja sama yang pernah dilakukan oleh Indonesia dengan negara lain. Tuliskan kelemahan dan kelebihan yang terdapat dalam kerja sama tersebut dalam buku tugasmu. Kemudian, laporkan hasilnya kepada gurumu.

Evaluasi Semester 2

Kerjakan pada buku tugasmu.

A. Pilih jawaban yang paling tepat.

1.

   Sumber : *www.asean.go.id*

   Negara mengadakan kerja sama untuk meningkatkan ....
   a. kepentingan nasionalnya
   b. kesejahteraan negara
   c. politik luar negeri
   d. hubungan internasional
2. Dasar perwujudan ASEAN adalah ....
   a. persamaan nasib sebagai negara yang pernah dijajah
   b. mempunyai perekonomian yang sama
   c. dalam satu kawasan, yaitu Asia Tenggara
   d. membentuk pertahanan militer regional
3. Berikut ini bukan merupakan Menteri Luar Negeri yang membentuk suatu badan kerja sama regional di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) yaitu ....
   a. Rajaratman
   b. Hasan Wirayuda
   c. Thanat Khoman
   d. Narcisco Ramos
4. Melaksanakan ketertiban dunia merupakan tanggung jawab ....
   a. individu
   b. semua negara
   c. negara bagian
   d. negara serikat
5. Sekretariat ASEAN yang dikepalai seorang Sekretaris Jenderal, berkedudukan di negara ....
   a. Manila
   b. Malaysia
   c. Singapura
   d. Indonesia
6. SEATO merupakan organisasi ....
   a. pertahanan
   b. makanan
   c. pendidikan
   d. transportasi
7.

   Sumber : *Gatra*, 23 April 2005

   Pada 1955 Indonesia menyelenggarakan konferensi yang dinamakan ....
   a. Konferensi Non-Blok
   b. Konferensi Timur Tengah
   c. Konferensi Asia-Eropa
   d. Konferensi Asia Afrika

8. Organisasi Asia Tenggara yang bergerak berdasarkan konsepsi negara-negara serumpun ....
   a. ASA
   b. ASPAC
   c. SEATO
   d. *Maphilindo*
9.

   Sumber : *Gatra*, 3 Januari 2007

   Dalam struktur organisasi ASEAN terdapat sidang tahunan para menteri yang disebut ....
   a. *summit meeting*
   b. *asia europe meeting*
   c. *standing committee*
   d. *committee*
10. Tujuan organisasi ASEAN adalah ....
   a. mengembangkan kepercayaan
   b. mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasional yang bebas dari halangan dari luar
   c. penyelesaian pertengkaran dan persengketaan secara damai
   d. meningkatkan kerja sama yang aktif dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi
11. Dalam melaksanakan hubungan dengan luar negeri Indonesia menggunakan program yang lebih dikenal sebagai ....
   a. politik bebas bebas
   b. politik aktif aktif
   c. poltik bebas aktif
   d. politik Indonesia
12. Identitas yang membedakan negara satu dengan yang lainnya dilihat dari ....
   a. budaya
   b. politik luar negeri
   c. kerja sama
   d. keaktifan
13. Pelaksanakan politik luar negeri di bawah suatu kementerian atau menteri yakni ....
   a. Menteri Dalam Negeri
   b. Menteri Luar Negeri
   c. Menteri Pariwisata
   d. Menteri Luar daerah
14. Landasan ideal politik luar negeri Indonesia ialah ....
   a. Pancasila
   b. UUD 1945
   c. undang-undang
   d. TAP MPR
15.

   Sumber : *www.googleimage.com*

   KTT yang tidak dihadiri oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono setelah menjadi presiden tahun 2004 adalah ....
   a. KTT APEC
   b. KTT NATO
   c. KTT Asia Afrika
   d. KTT ASEAN
16. Undang-Undang yang mengatur tentang hubungan luar negeri yaitu ....
   a. UU No. 22 Tahun 1999
   b. UU No. 37 Tahun 1999
   c. UU No. 22 Tahun 2000
   d. UU No. 37 Tahun 2000

17.

Sumber : *Sinar Grafika*

Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia ialah ....
   a. KEPRES
   b. peraturan Menlu
   c. Pancasila
   d. UUD 1945

18. Sifat dari politik luar negeri cenderung ....
   a. diam
   b. tetap
   c. bergerak
   d. aktif

19. Dalam mewujudkan tujuan politik luar negeri yang bebas dan aktif, ada beberapa sikap yang perlu didukung, kecuali ....
   a. memantapkan peranan Indonesia dalam ASEAN
   b. menyokong uji coba nuklir di bawah dasar laut
   c. mendukung netralisasi ASEAN dan Samudera Indonesia
   d. memperkokoh kerja sama negara-negara Non-Blok

20. Berikut ini merupakan salah satu kebijakan politik dan hubungan luar negeri ....
   a. peningkatan hubungan bilateral
   b. peningkatan disintegrasi
   c. peningkatan pembangunan spiritual
   d. peningkatan keyakinan

B. Isilah titik-titik berikut dengan benar.

1. Globalisasi adalah ....
2. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 berisi tentang ....
3. Politik luar negeri bebas aktif berdasarkan pada ....
4. Landasan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia antara lain ....
5. Tujuan diselenggarakannya politik luar negeri bebas aktif Indonesia antara lain ....
6. Presiden RI yang terpilih untuk periode 2004–2009 ialah ....
7. Menteri luar negeri Indonesia periode 2004–2009 ialah ....
8. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif lahir karena ....
9. Landasan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia antara lain....
10. Politik luar negeri cenderung bersifat ....

C. Jawablah pertanyaan berikut.

1. Apakah yang dimaksud dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif?
2. Mengapa Indonesia memilih politik luar negeri yang bebas dan aktif?
3. Apakah yang melatarbelakangi lahirnya politik luar negeri yang bebas dan aktif?
4. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan luar negeri?
5. Apakah yang menjadi landasan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia?
6. Menurutmu apakah Indonesia perlu membina hubungan dengan negara lain?
7. Bagaimana hubungan Indonesia dengan negara lain saat ini?
8. Tuliskan kaitan antara kebijakan luar negeri dengan politik luar negari.
9. Menurutmu apakah Indonesia perlu memiliki peranan dalam dunia internasional?
10. Tuliskan beberapa tantangan yang dihadapi oleh Susilo Bambang Yudhoyono setelah terpilih sebagai presiden.

Portofolio

Temui di sekitarmu, salah seorang yang berkecimpung dalam bidang politik. Tanyakan alasannya mengapa dia memasuki bidang politik. Politik seperti apa yang sebaiknya dilakukan menurut dia. Bandingkan jawaban mereka dengan jawaban kalian sendiri, temukan persamaan dan perbedaannya. Laporkan hasilnya secara berkelompok kepada gurumu.

Evaluasi Akhir Tahun

Kerjakan pada buku tugasmu.

A. Pilih jawaban yang paling tepat.

1. Rumusan Pancasila yang benar dan menjadi pedoman berbangsa dan bernegara terdapat pada ....
   a. Pembukaan UUD NKRI 1945
   b. Batang Tubuh UUD NKRI 1945
   c. Seluruh pasal dalam UUD NKRI 1945
   d. Tap MPR No. IV/MPR/2000
2. Sikap saling menghormati antarsuku bangsa merupakan kewajiban pergaulan terhadap sesama, karena kita ....
   a. menerima sifat perbedaan
   b. senasib sepenanggungan
   c. sama-sama warga negara
   d. diwajibkan bersikap demikian
3. *Dokuritsu Junbi Cosakai* merupakan nama lain dari ....
   a. Panitia Persiapan Kemerdekaan (PPKI)
   b. BPUPKI
   c. KNIP
   d. Dewan Revolusi Rakyat
4. Perwira Jepang yang menyediakan rumahnya dipergunakan untuk menyusun naskah Proklamasi, yaitu ....
   a. Jenderal Terauci
   b. Kapten Yamamoto
   c. Laksamana T. Maeda
   d. Brigadir Jenderal Kenjiro
5. Peranan BPUPKI adalah untuk ....
   a. meminta nasihat Jepang untuk kemerdekaan Indonesia
   b. memperlambat proses kemerdekaan bangsa Indonesia
   c. menyelidiki dan merumuskan syarat-syarat negara merdeka
   d. menandatangani kerja sama Indonesia dan Jepang
6. Hasil kerja dari Panitia Sembilan BPUPKI, yaitu ....
   a. UUD NKRI 1945
   b. GBHN
   c. Piagam Jakarta
   d. KNIP
7. Tokoh yang rumusan lima dasar negara dalam Sidang BPUPKI pada 31 Mei 1945 ialah ....
   a. Mr. Mohammad Yamin
   b. Prof. Dr. Soepomo
   c. Ir. Soekarno
   d. Drs. Moh. Hatta
8. Pemimpin negara Indonesia disebut ....
   a. raja
   b. presiden
   c. sultan
   d. kaisar
9. Presiden ketiga negara Republik Indonesia ialah ....
   a. Abdurrahman Wahid
   b. Megawati Soekarno Putri
   c. B.J. Habibie
   d. Susilo Bambang Yudhoyono
10. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden dibantu oleh ....
    a. menteri
    b. MPR
    c. wakil presiden
    d. DPR

11. Sistem pemilu dengan membagi wilayah negara dalam daerah-daerah pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota perwakilan disebut sistem ....
    a. mekanis
    b. organis
    c. distrik
    d. proporsional
12. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh ....
    a. DPR
    b. Rakyat
    c. MPR
    d. Presiden
13. Organisasi yang dalam bahasa jepangnya D*ocuritsu Junbi Linkai* adalah ....
    a. BPUPKI
    b. PPKI
    c. Paniitia Sembilan
    d. KNPI
14. Istilah Pancasila berasal dari Kitab *Sutasoma* karangan ....
    a. Mpu Prapanca
    b. Mpu Gandring
    c. Mpu Tantular
    d. Mpu Sindok
15. Musyawarah untuk mufakat merupakan bentuk dari pengamalan Pancasila, Sila ke ....
    a. dua
    b. tiga
    c. empat
    d. lima
16. Lembaga negara yang berwenang membuat Undang-Undang adalah ....
    a. presiden
    b. DPR
    c. MK
    d. MA
17. Dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh ....
    a. DPR
    b. DPD
    c. menteri
    d. hakim
18. Lembaga negara yang bertugas memeriksa keuangan negara adalah ....
    a. DPR
    b. DPD
    c. BPK
    d. KPK
19. Kepala pemerintahan provinsi disebut juga ....
    a. bupati
    b. gubernur
    c. walikota
    d. camat
20. Presiden diangkat dan diberhentikan oleh ....
    a. MPR
    b. DPR
    c. BPK
    d. DPD
21. Melaksanakan ketertiban dunia dan negara merupakan tanggung jawab ....
    a. bangsa
    b. warga negara
    c. pemerintah
    d. DPR
22. Keberhasilan negara Indonesia sebagai salah satu pemrakarsa penyelenggara Konferensi Asia-Afrika tahun 1955, membuktikan bahwa politik luar negeri Indonesia ....
    a. diacuhkan oleh dunia
    b. mengarah pada satu blok
    c. dilecehkan oleh dunia
    d. mendapat perhatian dunia
23. Rajaratman merupakan salah satu pemrakarsa terbentuknya ASEAN yang berasal dari negara ....
    a. Indonesia
    b. Malaysia
    c. Thailand
    d. Singapura

24. ASEAN merupakan perkumpulan negara-negara ....
    a. Asia Tenggara
    b. Asia Timur
    c. Asia Selatan
    d. Asia Barat daya
25. Faktor eksternal pembentukan ASEAN karena terjadi perang di negara ....
    a. Cina
    b. Thailand
    c. Vietnam
    d. Malaysia
26. Asas yang dianut oleh ASEAN yaitu asas ....
    a. keanggotaan tertutup
    b. keanggotaan terbuka
    c. keanggotaan tetap
    d. keanggotaan tidak tetap
27. Pada tahun pertama berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat dua kekuatan besar dunia yakni negara ....
    a. Cina dan Uni Soviet
    b. Indonesia dan Malaysia
    c. Amerika Serikat dan Jepang
    d. Amerika Serikat dan Uni Soviet
28. Identitas yang membedakan negara satu dengan yang lainnya dilihat dari ....
    a. budaya
    b. politik luar negeri
    c. kerja sama
    d. keaktifan
29. Pemulihan perekonomian Asia Tenggara merupakan salah satu tujuan politik luar negeri Indonesia dalam konteks ....
    a. nasional
    b. bilateral
    c. regional
    d. global
30. Berikut bukan KTT yang dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu KTT ....
    a. APEC
    b. ASEM
    c. Asia Afrika
    d. NATO

B. Isilah titik-titik berikut dengan benar.

1. Tokoh yang membacakan Teks Proklamasi Kemerdekaan RI adalah ....
2. *Kitab Negarakertagama* merupakan karya ... sedangkan *kitab Sutasoma* merupakan karya ...
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 berisi tentang ....
4. Dalam sistem pemerintahan campuran, kedudukan kepala negara dipegang oleh ....
5. Lembaga perwakilan disebut dengan ....
6. Hak presiden untuk memulihkan nama baik seseorang disebut ....
7. ASEAN adalah kepanjangan dari ....
8. Dasar perwujudan ASEAN antara lain ....
9. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 berisi tentang ....
10. Politik luar negeri Indonesia bersifat ....

C. Jawablah pertanyaan berikut.

1. Tuliskan siapa saja yang termasuk Panitia Sembilan.
2. Apakah yang dimaksud dengan *Dokuritsu Junbi Cosakai?*
3. Tuliskan hak-hak yang dimiliki oleh DPR.
4. Uraikan kewajiban yang dimiliki oleh DPR.
5. Uraikan enam hal yang menjadi urusan pemerintah pusat?
6. Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah?
7. Tuliskan tujuan organisasi ASEAN.
8. Tuliskan beberapa negara yang tergabung dalam ASEAN.
9. Uraikan latar belakang terbentuknya ASEAN.
10. Tuliskan tujuan diselenggarakannya politik luar negeri bebas aktif Indonesia.

Daftar Pustaka

Sumber Buku

Anwar, Syaiful. 1996. *Sendi-Sendi Hukum Tata Negara*. Bandung: Tarsito.

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Azwar, Rully Chairul. 2007. *Jurnal Konstitusi (Partai Politik, Pilkada dan Media Massa)*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Indonesia.

Badan Standar Nasional Pendidikan. 2006. *Standar Isi*. Jakarta: Depdiknas.

Dewan Harian Nasional Angkatan 45. 1991. *Pedoman Umum Pelestarian Jiwa, Semangat dan Nilai-Nilai 45*. Jakarta: Dewan harian Nasional Angkatan 45.

Isjwara, F. 1999. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Putra A Bardin.

Kusnardi dan Hernaily Ibrahim. 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI dan Sinar Bakti.

Raga Maran, Rafael. 1999. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syafiie, Inu Kencana dan Azhari. 2005. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang *Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sumber Majalah dan Koran

50 Tahun ABRI, 1995

30 Tahun Indonesia Merdeka, 1977

30 Tahun Indonesia Merdeka, 1978

Media Indonesia, 9 Agustus 2007

Tempo, 29 Juli 2007

Kompas, 8 Agustus 2007

Republika, 23 Juli 2007

Gatra: 50 Tahun Konferensi Asia Afrika , 23 April 2005

Sumber Lain

www.courseware.com
www.indonesia-ottawa.org
www.pnri.go.id
www.kbri-canbera.org

Glosarium

Abolisi	:	penghentian tuntutan pidana.
Amnesti	:	pembatalan hukuman.
APEC	:	Kerja sama negara-negara Asia Pasifik
ASA	:	*Association of South East Asia*
ASEAN	:	*Association of South East Asian Nations*
ASEM	:	*Asia Europe Meeting*
ASPAC	:	*Asia Pacific Coorporation*
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPUPKI	:	Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Demokrasi	:	bentuk atau sistem pemerintahan yang melibatkan rakyat untuk turut serta memerintah melalui perantara wakilnya.
Dokuritsu Junbi Cosakai	:	istilah untuk BPUPKI dalam bahasa Jepang.
Dokuritsu Junbi Linkai	:	istilah untuk PPKI dalam bahasa Jepang.
DPD	:	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Duta	:	orang yang mewakili suatu negara di negara lain untuk mengurus kepentingan negara yang diwakilinya, membantu dan melindungi warga negaranya yang tinggal di negara itu.
Eksekutif	:	lembaga yang melaksanakan undang-undang.
Garuda	:	pasukan perdamaian PBB dari Indonesia.
GNB	:	Gerakan Non-Blok
Grasi	:	pengurangan atau pengampunan hukuman.
Hak Amandemen	:	hak DPR untuk mengadakan perubahan peraturan.

Hak Angket	:	hak DPR untuk mengadakan penyelidikan karena diduga terlibat kasus.
Hak Budget	:	hak DPR untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah.
Hak Inisiatif	:	hak DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang.
Hak Interpelasi	:	hak DPR untuk meminta keterangan terutama kepada eksekutif.
Hak Petisi	:	hak DPR untuk mengajukan pertanyaan bagi setiap anggota.
KAA	:	Konferensi Asia Afrika
Kabinet	:	badan atau dewan pemerintah yang terdiri atas para menteri.
Kedaulatan	:	pengambil keputusan tertinggi dalam persoalan negara.
KNIP	:	Komite Nasional Indonesia Pusat
KPUD	:	Komisi Pemilihan Umum Daerah
KTT	:	Konferensi Tingkat Tinggi
Legislatif	:	lembaga yang membuat undang-undang.
Lembaga	:	badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha.
Maphilindo	:	organisasi berdasarkan konsepsi negara-negara serumpun.
Nasionalisme	:	paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri.
Negara	:	organisasi di suatu daerah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.
Negarakertagama	:	kitab yang dikarang oleh Mpu Prapanca.
NKRI	:	Negara Kesatuan Republik Indonesia
MA	:	Mahkamah Agung
MK	:	Mahkamah Konstitusi
MPR	:	Majelis Permusyawaratan Rakyat

Pancasila	:	lima dasar
Panitia Sembilan	:	panitia perumus yang dibentuk oleh BPUPKI untuk membahas dan merumuskan gagasan mengenai dasar negara Indonesia.
Partai	:	perkumpulan (segolongan orang) yang sehaluan dan setujuan (terutama di bidang politik).
Patriotisme	:	sikap yang mencerminkan semangat cinta tanah air dengan rela berkorban demi kejayaan dan kemakmuran rakyat.
Pemilu	:	sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan, adil.
Piagam Jakarta	:	rumusan dasar Indonesia merdeka yang melibatkan rakyat untuk turut serta memerintah melalui perantara wakilnya.
Pilkada	:	Pemilihan kepala daerah
Politik	:	kebijakan atau strategi dalam suatu pemerintahan.
Proklamasi	:	pemberitahuan atau pengumuman resmi atas nama bangsa.
PPKI	:	Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Rehabilitasi	:	pemulihan nama baik.
RI	:	Republik Indonesia
SEATO	:	*South East Asia Treaty Organization*
Sutasoma	:	kitab yang dikarang oleh Mpu Tantular.
Yudikatif	:	lembaga yang mengawasi pelaksanaan undang-undang.